PARTNERTSHIP GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN BULUKUMBA

SKRIPSI

Oleh

ANDI ARIEL SETIADI

Nomor Stambuk Mahasiswa : 105641107520

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

SKRIPSI

PARTNERTSHIP GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN BULUKUMBA

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.IP)

Disusun dan Di Ajukan Oleh :

ANDI ARIEL SETIADI

Nomor Induk Mahasiswa: 105641107520

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: *Partnership Governance* Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bulukumba
Nama Mahasiswa	: Andi Ariel Setiadi
Nomor Induk Mahasiswa	: 105641107520
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Fakultas	: Fakultas Ilmu Sosisal Dan Ilmu Politik

Menyetujui :

Pembimbing I	Pembimbing II
Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I	**Ahmad Taufik, S.IP., M.AP**

Mengetahui :

Dekan Fisipol Unismuh Makassar	Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Dr. Hj. Ihyana Malik, S,Sos., M.Si	**Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I**
NBM. 730 727	**NBM. 1207 163**

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh tim penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0224/FSP/A.4-II/I/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Senin 29 Januari tahun 2024.

Mengetahui:

KETUA	SEKRETARIS
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	**Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP.,M.Si**
NBM. 730727	**NBM. 1207163**

TIM PENGUJI

1. Rudi Hardi, S.Sos M.Si (Ketua) ( )
2. Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP.,M.Si ( )
3. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I ( )
4. Muhammad Randhy A, S.IP., M.Si ( )

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Ariel Setiadi

Nomor Induk Mahasiswa : 105641107520

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Januari 2024

Yang Menyatakan,

Andi Ariel Setiadi

ABSTRAK

Andi Ariel Setiadi, Ahmad Harakan dan Ahmad Taufik, *Partnertship Governance* Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Bulukumba. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu PolitikUniversitas Muhammadiyah Makassar

Adapun tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui proses *partnertship governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba, Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwah evaluasi Partnership Governance dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bulukumba, dengan fokus pada Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Hasil menunjukkan implementasi yang efektif melalui identifikasi dan optimalisasi aset kreatif, membangun lingkungan sinergis, dan memitigasi hambatan seperti sumber daya terbatas. Komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, manajemen risiko, dan transparansi menjadi landasan partnership governance yang berhasil, menciptakan dasar yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba.

Kata Kunci : *Partnertship Governance*, Ekonomi Kreatif

KATA PENGANTAR

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu”

Segala puji syukur kita panjatkan untuk kehadirat Allah Swt, Sang pencipta yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*PARTNERTSHIP GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN EKONOMIKREATIF DI KABUPATEN BULUKUMBA”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penelis menyampaikan ucapan terimah kasih kepada.

1. Terhormat kedua orang tua tercinta saya, Ayahanda Abd Azis Ibunda Nurcaya Rajin S.Pd dan seluruh keluarga yang telah rela berkorban tanpa pamrih dalam membesarkan, mendidik serta mendoakan keberhasilan saya yang tiada hentinya memberi dukungan motivasi disertai segala pengorbanan yang tulus dan ikhlas.
2. Bapak Ahmad Harakan, S.IP,M.H.I selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Taufik., S. IP., M.AP selaku pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan dan segala arahan dalam menyelesaika skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ibu Hj. Lhyani Malik, S. Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya
5. Bapak Ahmad Harakan, S.IP,. M.H.I selaku Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, seluruh staff di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Muhammadiyah Makassar.
7. Kantor Desa BIRA dan seluruh informan yang telah membantu dan memberikan rahan dan informasi kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.

Terimakasih kepada kekasih ku tercinta Arhania Marhanisa. S.Pd Wanita hebat, motivator pribadi, sang calon pendamping wisuda yang tanpa henti selalu memberikan dukungan dan semangat. Nasihat dan saran yang ia berikan adalah hal yang menolong dan membuat saya tersadar untuk berusaha lebih baik dan bekerja lebih keras. Kamu adalah sosok tebaik, yang tidak bisa tetap acuh pada masalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Betapa beruntungnya aku bertemu denganmu di jalan hidupku meskipun kamu telah melakukan banyak hal luar biasa bagi saya, saya ingin mengucapkan terima kasih hanya untuk satu di antaranya: atas kehadiranmu dalam hidupku. Dan skripsi ini adalah persembahan saya untukmu.dan Teman seperjuangan di kelas IP C yang sama-sama berjuang dan selalu memberikan banyak bantuan, semangat, motivasi serta dukungan dalam penyelesaian tugas akhir skripsi. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Demi kesempurnaan Skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan ilmu yang berarti bagi pihak yang membutuhkan

“Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu”

Makassar, 20 Januari 2024

Penulis

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR HASIL ii
HALAMAN PERNYATAAN KARYA TULIS ILMIAH iii
DAFTAR ISI vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
A. Penelitian Terdahulu 7
B. Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif 9
C. Kerangka Pikir 16
D. Fokus Penelitian 19
E. Deskripsi Fokus Penelitian 19
BAB III METODE PENELITIAN 22
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian 22
B. Jenis Dan Tipe Penelitian 22
C. Sumber Data 23
D. Informasi Penelitian 23
E. Teknik Pengumpulan Data 24
F. Teknik Analisis Data 25
G. Keabsahan Data 26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 28
A. DeskripsiObjek Penelitian 28
B. Hasil Penelitian 39
C. Pembahasan 71
BAB V PENUTUP 97
A. Kesimpulan 97
B. Saran 98
DAFTAR PUSTAKA 111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partnertship Governance merupakan sebuah proses yang didalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terikat untuk mengusung kepentingan masing-masing intansi dalam mencapai tujuan bersama. (Cordery, 2004; Hartman et al., 2002). Tetapi *Partnertship governance* bisa saja mengalami kegagalan apabila masih banyak terdapat kendala terhadap kewenangan hirarki organisasi, kurangnya komitmen pemerintah, kurangnya kepercayaan masyarakat, terbatasnya SDM, keterbatasan informasi, kurangnya melibatkan stakeholder lain seperti kapasitas pemerintah lokal. Hal ini mengartikan *Partnertship governance* berperan penting dalam mencapai suatu tujuan tertentu, apabila *Partnertship governance* dapat terjalin dengan baik dan optimal antara pemerintah dan stakeholder terkait maka tujuan akan tercapai secara efektif (Habiba 2020).

Partnertship Governance berbasis pada tujuan untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari para pihak yang terikat. Pihak tersebut tidak hanya berbatas pada intansi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan masyarakat sipil dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Kerjasama diinisiasi atas keterbatsan kapasitas, sumberdaya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga kerjasama dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Dalam perumusan tujuan, visi-misi, norma dan nilai bersama dalam kerjasama, kedudukan masing-masing

pihak bersifat setara yakni memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen walaupun terikat pada kesepakatan bersama.

Partnertship Governance adalah pemerintahan yang disusun dan melibatkan badan publik dan organisasi non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi musyawarah mufakat dan ada pembagian peran untuk melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program publik serta aset publik (Chris Ansel & Alison Gash, 2007).

Ekonomi Kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sektor penggerak yang penting dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Ekonomi ini digerakkan oleh sumber daya terbarukan dan tersedia secara berlimpah di Indonesia, yaitu sumber daya manusia kreatif dalam jumlah besar, sumber daya alam terbarukan yang berlimpah, dan sumber warisan budaya yang unik dan beragam. Ketiganya menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan (Hasan 2018).

Bagi Indonesia ekonomi kreatif tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga memajukan aspek-aspek non ekonomi, berbangsa dan bernegara. Melalui ekonomi kreatif, kita dapat memajukan citra dan identitas bangsa, mengembangkan sumber daya yang terbarukan, dan mempercepat pertumbuhan inovasi dan kreativitas dalam negeri. Disamping itu, ekonomi kreatif juga telah memberikan dampak sosial yang positif, termasuk peningkatan kualitas hidup, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan toleransi sosial (Rusyadi. Y 2022).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 2t ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif serta untuk mewujudkan infrastruktur Ekonomi Kreatif dan insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025, Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan yang mengandung keorisinilan, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, serta warisan budaya dan teknologi merupakan kekayaan intelektual. Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa dan kontribusi usaha Ekonomi Kreatif dalam perekonomian nasional diperlukan kerangka strategis pengembang Ekonomi Kreatif nasional dalam jangka panjang yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terintegrasi dan kolaboratif. Selain itu pengembangan Ekonomi Kreatif nasional secara terintegrasi dan kolaboratif perlu didukung dengan kreativitas sumber daya manusai dan inovasi dalam penumbuhan usaha kreatif yang dituangkan dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional (Noviriska. N 2022).

Terkait dengan pembangungan ekonomi kreatif RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2023 mengacu kepada misi ke-4 2023 yaitu mewujudkan

ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi. Tujuan misi keempat adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berpusat pada masyarakat (*community centered*) berbasiskan inovasi dan daya kreasi dan berdaya saing tinggi dengan sasaran berkembangnya ekonomi daerah berbasis inovasi dan daya kreasi yang digerakkan oleh masyarakat (*community centered*).

Saat ini peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sudah cukup terlihat khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja. Ekonomi kreatif berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah khususnya terkait sumbangan devisa yaitu adanya berbagai barang yang diekspor keluar negeri misalnya Kapal pinisi dan kerajinan tangan. Kondisi ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang bekerja di berbagai UKM dan IKM diantaranya Kuliner. Kabupaten Bulukumba sendiri fokus pada optimasi Beberapa sektor yaitu UKM dan IKM. Untuk peran pelaku ekonomi kreatif di bidang distinasi wisata, kuliner dan tempat bersejarah (Ginting. A 2018).

Dari hasil observasi mengenai kondisi terkini UKM tersebut bahwa pameran ini, merupakan produk hasil karya UMKM yang dibina oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bulukumba. juga berharap agar UMKM-UMKM lokal semakin didorong ke depan dalam menggerakkan roda perekononian masyarakat. Pemerintah menaruh harapan besar agar UMKM Bulukumba dapat terus dimaksimalkan, sehingga market dan omsetnya juga lebih besar. Ia minta pameran UMKM dapat berkelanjutan dan bukan hanya sebatas perayaan di Hari Jadi saja.

Bahkan, saya siap jadi marketing keluar. Tapi tolong jaga kualitas dan kuantitas produknya. Saya kira ini pekerjaan yang harus ditindaklanjuti oleh Disperindag, Koperasi dan UKM, Dekranasda dan semua pelaku UMKM.

Belum terbentuknya Peraturan Pemerintah di Kabupaten Bulukumba tentang sistem pemasaran produk-produk ekonomi kreatif menjadi salah satu faktor terhambatnya pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba. Sebagai salah satu sektor pariwisata di Kabupaten Bulukumba.

Hal ini mengartikan bahwa *Partnertship governance* berperan penting dalam mencapai tujuan suatu tertentu, apabila *Partnertship governance* dapat terjalin dengan baik dan optimal antara pemerintah dan stakeholder terkait maka tujuan akan tercapai secara efektif. Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *Partnertship Governance* Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Bulukumba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana proses *partnertship governance* dalam pengembangan ekonomikreatif di Kabupaten Bulukumba?

2. Faktor apa saja yang mendukung dan memperhambat proses *partnertship governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses *partnertship governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempercepat dan memperhambat proses *partnertship governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan Konsentrasi Manajemen Sektor Publik tentang Program Ekonomi Kreatif
2. Kegunaan Praktis

   Secara praktis diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi pemikiran dan masukan, serta sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait agar pelaksanaan program Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bulukumba berjalan dengan baik lagi sesuai dengan perencanaan yang telahditetapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

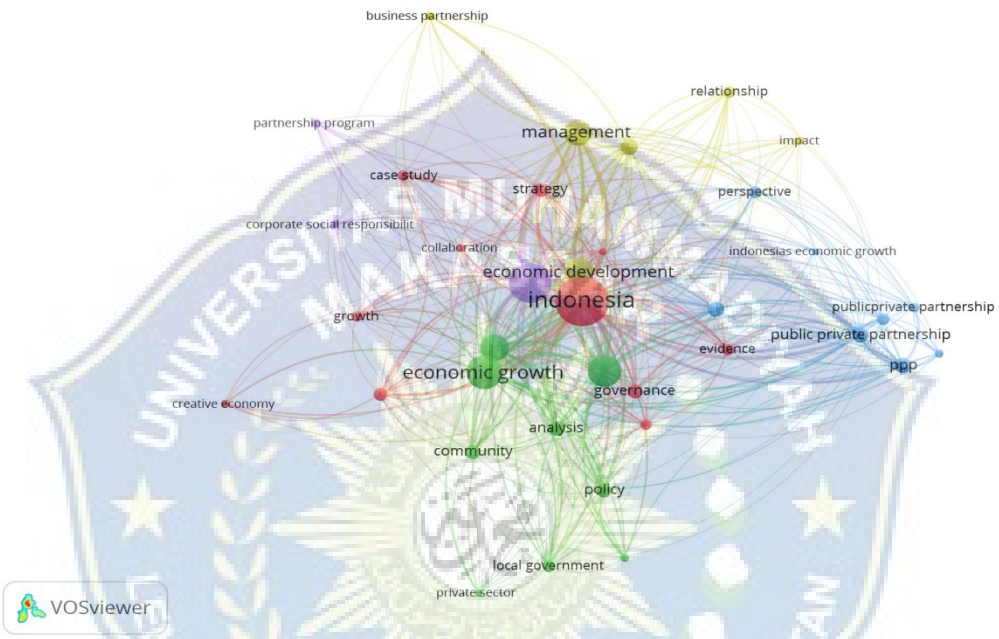

Berdasarkan hasil dari penelusuran kepustakaan dengan menggunakan publish or perish ditemukan 104 jurnal dengan rentan waktu 2013-2023 yang di mana artikel –artikel tersebut berkaitan erat dengan kata kunci public privat partnertship. Artikel-artikel ini kemudian dikelola menggunakan *vosviewer* untuk menentukan posisi proyek penelitian dari peneliti. Dari hasil hasil olah data *vosviewer* ada 23 items dan beberapa penelitian yang menjadi objek dalam penelitian terdahulu, diantaranya penelitian yang membahas tentang implementasi *Public Private Partnership*. Ada beberapa penelitian tentang implementasi Public Private Partnership.

Seperti, Penelitian berfokus pengembangan pariwisata di era global, menciptakan pariwisata yang memberikan suasana nyaman dan alami, serta melakukan koordinasi dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan swasta (Haryanti, 2020). Atau penelitian yang berfokus pada regulasi dan strategi dalam penyediaan infrastruktur air minum dengan skema *Public Private Partnership* (PPP), dari penelitian ini ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor utama untuk penggerak dalam perekonomian. Akan tetapi, rendahnya tingkat investasi dapat memberikan dampak negatif untuk perekonomian. M., Gasali & Zulfhi (2016). Dan yang terakhir penelitian Ismowati (2016) yang melakukan penelitian mengenai kajian urgensi PPP, bahwa PPP tidak selalu berkonotasi buruk. Untuk melaksanakan PPP agar bisa berhasil maka syarat-syarat yang diperlukan harus bisa terpenuhi yang berhubungan dengan keinginan pemerintah kota untuk membangun dan mengerjakan proyek-proyek Kota yang lebih maju

Berdasarkan hasil penelusuran vosviwer di atas peneliti menyimpulkan bahwa saat ini telah banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang Partnetrship Governance yang mengacu pada Economic Development dan Economic Growth yang menganalisis tentang bagaimana pemerintah dan komunitas bisa yang mengatur tentang peningkatan suatu produksi untuk ekonomi kreatif suatu daerah. Maka peneliti tertarik mengambil judul Partnertship Governance dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba.

Peneliti menjadikan artikel-artikel di atas sebagai bahan pijakan referensi penelitian terdahulu karena artikel tersebut membahas tentang implementasi

Public Private Partnertship sebagai usaha keberhasilan pengembangan pariwisata di era global.

B. Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif

1. Public Private Partnership

Public private partnership adalah kontrak yang mengikat secara hukum antara dua pihak yaitu lembaga atau badan swasta dan negara atau pemerintah pusat. Dimana dalamperusahaan swasta memiliki tanggung jawa untuk mengambil risiko keuangan yang besar dan menggunakan fasilitas pemerintah untuk memberikan dukungan infrastruktur dan layanan kepada masyarakat umum. Ada juga tren yang muncul dari pemerintah yang membiayai proyek-proye tersebut serta terlibat dalam berbagi risiko keuangan dan pembelian jika diperlukan. Perusahaan swasta pada gilirannya diizinkan untuk mengambil keuntungan dari pengembalian yang mereka dapatkan dengan menyediakan layanan tersebut. Dalam pengembangan obyek wisata (PPP) (*Public Private Partnership)* merupakan hubungan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta sebagai investor dengan berbagai keahlian baik secara teknik, operasional maupun secara inovasi dalam perjalanan bisnis secara efisien dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam pembangunan destinasi wisata (Fitriyah, 2016).

Public private partnership menggambarkan layanan pemerintah atau usaha bisnis swasta yang didanai dan dioperasikan melalui kemitraan pemerintah dan satu atau lebih perusahaan sektor swasta. Skema ini kadang-kadang disebut sebagai PPP (*Public Private Partnership*) (Johnson, 2010). Pemerintah India mendefinisikan P3 sebagai “kemitraan antara entitas sektor

publik (otoritas sponsor) dan entitas sektor swasta (entitas hukum di mana 51% atau lebih ekuitas adalah dengan mitra swasta) untuk penciptaan dan / atau pengelolaan infrastruktur untuk tujuan publik untuk jangka waktu tertentu (periode konsesi) dengan persyaratan komersial dan di mana mitra swasta telah diperoleh melalui sistem pengadaan yang transparan dan terbuka" (Out dan Mmom, 2015).

2. Strategi Pengembangan

Istilah strategi berasal dari kata kerja dalam bahasa yunani. Sebagai katabenda, strategos merupakan gabungan kata"statos" (militer) dengan "ego" (memimpin). Sebagai kata kerja, stratego berarti merencanakan (to plan). Strategi merupakan seni memadukan atau menginteraksikan antara faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi dalam mencapai tujun. Strategi adalah untuk mengoptimalkan sumber daya unggulan dalam memaksimalkan pencapaian sasaran kinerja. Perencanaan strategi merupakan proses manajerial untuk pengembangan dan mempertahankan kesesuaian yang layak antara sasaran dan sumber daya perusahaan dengan peluang-peluang pasar yang selalu berubah. Tujuan perencanaan. Strategi adalah terus menerus mempertajam bisnis dan produk perusahaan sehingga keduanya berpadu menghasilkan laba dan pertumbuhan yang memuaskan (Aysa, I (2020).

Strategi menekankan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. strategi ritel meliputi penentuan target pasar, sifat barang dan jasa yang di tawarkan dan bagaimana ritel memproleh keuntungan jangka panjang dari para pesaingnya.

Secara konseptual strategi pengembangan dalam konteks industry adalah upaya untuk melakukan analisis terhadap kondisi pasar kawasan baik internal yang meliputi kelemahan dan kekuatan dan kondisi pasar eksternal yaitu peluang dan ancaman yang akan di hadapi, kemudian yang di ambil alternatif untuk menentukan strategi yang harus di lakukan. Analisis pasar internal merupakan suatu proses untuk melalui faktor-faktor keunggulan strategi perusahaan/ organisasi untuk menetukan dimana letak kekuatan dan kelemahannya, sehingga penyusunan strategi dapat dimanfaatkan secara efektif. Kesempatan profil sumber daya dan keunggulan, membandingkan profil tersebut dengan kunci sukses, dan mengidentifikasikan kekuatan utama di mana industry dapat membangun strategi untuk mengeksplokasikan peluang dan meminimalkan kelemahan dan mencengah kegagalan.

3. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif pada hakikatnya adalah kegiatan ekonomi yang mengutamakan pada kreatifitas berfikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang memiliki nilai dan bersifat komersial. Ada bebrapa aspek ekonomi yang dapat diamati dari kreatifitas, yaitu konstribusi terhadap kewirausahaan, pendorong inovasi, peningkatan produktivitas dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut kelompok kerja desain power kementrina perdagangan RI, dalam pengembangan ekonomi Kreatif Indonesia 2010-2014 mengemukakan ekonomi kreatif merupakan era ekonomi baru yang mengutamakan informasi dan kreativiats dengan mengendalikan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi uatama dalam kegiatan ekonomi (Hasibuan, R. H 2023).

Sektor ekonomi kreatif mutlak harus mendapatkan perhatian. Hal ini karena sektor ini memiliki peranan penting terhadap perekonomian nasional. Namun upaya mengembangkan sektor ekonomi kreatif kini dan mendatang masih menghadapai permasalahan.

a. Penetapan 16 subsektor ekonomi kreatif belum diiringi upaya penyiapanyang sistemik, khususnya pada tataran regulasi dan infrastruktur penunjang. Artinya, sebagian besar pemerintah daerah belum menyadari keberadaan ekonomi kreatif sebagai suatu talenta baru yang dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi dan bahkan memicu daya saing daerah (Ganting, A. M 2018).
b. Kehadiran ekonomi kreatif sebagai wujud ide keratif-inovatif masyarakat dan manfaat keekonominnya, belum mampu menstimulasi pemrintah daerah khususnya untuk negara merespon melalui pengaturan dan penataan serta pengembangan usaha dan produk-produk kreatif yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan nilai kemanfatan yang dapat langsung dirasakan masyarakat.
c. Diversifikasi budaya dan potensi wilayah yang spesifik dan sangat variatif telah mendorong masyarakat untuk melakukan usaha-usaha dan menghasilkan produk-produk kreatif. Hanya saja, pemerintah daerah belum melakukan upaya yang dapat terjangkau untuk mengangkat keunggulan, budaya dan karateristik wilayahnya, sehingga dapat menstimulasi lahirnya kewirausahaan lokal yang konstribusi bagi pertumbuhan perekonomian daerah dan turut memilih daya saing

daerah, bahkan nasional.

System Context dapat memengaruhi dinamika dalam kinerja kolaborasi dalam proses *collaborative governance* sehingga membuka suatu peluang baru untuk menghadirkan tantangan yang terduga pada masa yang akan datang. *System Context* juga dapat mendorong atau bahkan menghambat kerja sama antara aktor *stakeholder* maupun antara lembaga dengan pemangku kepentingan. Dari *System Context* ini muncul ruang kendali seperti berikut:

1. Kepemimpinan (*leadership*)

   Kehadiran peran kepemimpinan diidentifikasi sebagai pengelola sumber daya dalam mewujudan collaborative governance dengan berkomitmen secara kolaborasi dalam memecahkan masalah. Pemimpin terkait konteks sistem ini memulai upaya kolaboratif dengan penyediaan staf dan sumber daya lainya untuk memperkuat upaya adanya tekanan antar stakeholder dan ketidakpastian kondisi dan ketergantungan antar aktor (Hardi, W 2020).

2. Konsekuensial Insentif (*conseqential incentives*)

   Hal ini mengacu kepada penggerak internal (kebutuhan sumber daya) dan eksternal (krisis situasional, ancaman dan peluang) untuk melakukan kolaborasi. Hadirnya insentif baik positif atau negatif harus ada pendorong bagi para pemimpin dengan antar aktor untuk terlibat kolektif bersama.

3. Interdepensi (*interdependence*)

   Setiap individu dalam organisasi tidak dapat mencapai tujuanya

dengan sendiri melaikan adanya kolaborasi sebagai insentif konsekuensial utama. Ketika organisasi publik tidak berhasil mengatasi masalah publik dengan kekuatan sumber dayanya sendiri maka menjangkau antar lembaga dan sektor menjadi opsi yang diperlukan.

4. Ketidakpastian (*uncertainty*)

   Ketidakpastian dalam masalah publik menjadi peluang apabila dikelola melalui sekelompok yang berkolaborasi. Melalui kerangka kerja integratif yang menunjuk kan kolaborasi lintas sektor dalam hal pengambilan keputusan yang didasari kesamaan ketidakpastian kolektif dalam mengelola masalah sosial yang berkaitan dengan driver untuk mengubah arah respons kompetisi menjadi kerja sama (Emerson, Nabatchi dan Balogh, 2011).

Adapun tahapan tahapan pengelolaan aset yakni meliputi aktifitas sebagai berikut (Kolinung *etal*, 2015):

1. Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan seluruh kebutuhan milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang sebelumnya dengan keadaan yang sedang berjalan yang dapat di jadikan dasar dalam melakukan tidakan pemenuhan kebutuhan selanjutnya.
2. Penggunaan merupakan segala aktifitas yang dilakukan oleh pemegang kuasa dalam pengelolaan serta menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan.

3. Pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak di pergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, barang tersebut meliputi sewa, pinjam pakai, Kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
4. Pengamanan merupakan segala kegiatan berupa Tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif, serta Upaya hukum. Pemeliharaan merupakan kegiatan yang dilakukan agar seluruh barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan dapat digunakan secara berdaya guna dan berhasil.

Model *Public Private Partnership* Kerjasama pemerintah dengan pihak suasta dalam skema *public private partnership* memiliki berbagai bentuk dan tidak ada satupun model yang persis sama dengan model lainnya. Dalampraktekny a merupakan kombinasi dari fungsi berikut:

1. *Design build finance operate* (DBFO). Model ini merupakan bentuk paling umum dari PPP. Model ini mengintegrasikan empat fungsi dalam kontrak kemitraan mulai dari perancangan, Pembangunan, pembiayaan hingga pengoprasian. Penyediaan infrastruktur publik di biayai dari penghimpunan dana swasta seperti perbankan dan pasar modal. Penyedia akan membangun, memelihara dan mengoperasikan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan sektor publik. Penyediaan akan di bayar sesuai dengan layanan yang diberikan untuk suatu

standarkinerja tertentu sesuai kontrak.

2. *Design Build Operate* (DBO). Merupakan salah satu variasi model DBFO. Dalam model ini, pemerintah menyediakan dana untuk perancangan dan Pembangunan fasilitas publik. Setelah proyek selesai, fasilitas diserahkan kepada pihak suasta untuk mengoperasikannya dengan biaya pengelolaan ditanggung oleh pihak swasta. Pemerintah berperan sebagai penyedia dana dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Pihak swasta bertanggung jawab sebagai pengelola yang memaksimalkan potensi infrastruktur sehingga mampu memberikan pendapatan daerah.

4. Konsep Partnership Governance

Konsep dasar dari *governance* adalah adanya interaksi atau kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip penyelengaraan pemerintahan yang baik. Pemahaman tentang *governance* tidak bisa lepas dari peran ketiga pilar dalam mengelola urusan di sektor publik agar urusan tersebut lebih efektif dan efisien. Perkembangan lebih lanjut dari *governance* ini melahirkan konsep yang lebih memberi penekanan pada hubungan yang bercirikan khusus sehingga memberikan label baru pada konsep *governance*, antara lain *partnership governance*, yaitu pola hubungan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip kemitraan. (Bovaird, 2004) mendefinisikan kemitraan sebagai pengaturan pekerjaan berdasarkan

komitmen timbal balik, melebihi dan di atas yang diatur dalam setiap kontrak, antara satu organisasi di sektor publik dengan organisasi di luar sektor publik. Demikian juga (Munro, Roberts, M, & Skelcher, C, 2008) melihat *partnership* sebagai bentuk kerjasama antara pemimpin masyarakat dengan manajer publik untuk efektivitas demokrasi. Sebagian besar pemerintah sebenarnya telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, tetapi sebagian besar kerjasama yang dibangun masih bersifat konvensional (non-kemitraan), yaitu sebatas pada kerjasama antara pemerintah sebagai pemilik pekerjaan dengan lembaga swasta sebagai *vendor* atau kontraktor. Kerjasama ini tidak lebih dari transaksi jual beli barang dan jasa antara pemerintah sebagai prinsipal dan pihak swasta sebagai agen. Kedudukan diantara keduanya tidak setara, pemerintah sebagai prinsipal mempunyai otoritas untuk memilih agen yang sesuai dengan kriteria yang dimilikinya untuk melaksanakan pekerjaan. Kerjasama cenderung bersifat jangka pendek dengan intensitas hubungan yang terbatas, sebagaimana diatur dalam kontrak. Kemanfaatan dari kerjasama dihitung sebagai kompensasi atau prestasi dan resiko ditanggung oleh masing-masing pihak. Kerjasama yang dibangun tidak melibatkan sumberdaya dari agen, tidak ada penggabungan sumberdaya. Kalau dilihat dari pola kerjasama tersebut kelihatannya sudah ada kemitraan antara pemerintah dengan non pemerintah, tetapi sebenarnya belum ada (Dwiyanto, 2012). Konsep partnership governance adalah pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan dan pengembangan suatu wilayah, sektor, atau inisiatif tertentu yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat

lokal. Dalam partnership governance, ketiga pihak ini bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, mengatasi tantangan, dan memanfaatkan peluang yang ada. Berikut ini adalah beberapa karakteristik utama dari partnership governance:

1. Keterlibatan Multi-Stakeholder: Partnership governance melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau "stakeholder" yang relevan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, akademisi, organisasi non-pemerintah, dan lainnya. Setiap pemangku kepentingan berkontribusi dengan keahlian, sumber daya, dan perspektif yang berbeda.
2. Kolaborasi dan Kemitraan: Partnership governance mendorong kerja sama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi kegiatan. Ini mencakup berbagi informasi, sumber daya, dan tanggung jawab untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan.
3. Pembagian Tanggung Jawab: Dalam partnership governance, setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan keahlian, kapasitas, dan peran mereka. Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan, pengawasan, dan fasilitasi, sementara sektor swasta berkontribusi dengan investasi, pengelolaan operasional, dan pemasaran. Masyarakat lokal juga berperan dalam partisipasi aktif, pelestarian budaya, dan pengelolaan sumber daya.
4. Keputusan Bersama: Partnership governance mendorong pengambilan keputusan yang kolaboratif dan demokratis. Pemangku kepentingan

berdiskusi, berunding, dan mencapai kesepakatan bersama tentang kebijakan, program, dan tindakan yang akan diambil. Keputusan ini mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat.

5. Transparansi dan Akuntabilitas: Partnership governance mempromosikan transparansi dalam pertukaran informasi, kegiatan, dan keputusan. Pemangku kepentingan bertanggung jawab satu sama lain dan terhadap publik dalam mencapai hasil yang diharapkan. Mekanisme pengawasan dan evaluasi digunakan untuk memastikan akuntabilitas dan pembelajaran.

Tujuan dari partnership governance adalah untuk menciptakan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal untuk mengatasi kompleksitas dan meningkatkan efektivitas dalam pengembangan wilayah atau sektor tertentu. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih holistik, inovasi, keberlanjutan, dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas.

3. Konsep dan Aktor Aktor Kemitraan Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

a) Peran Pemerintah dalam Partnership Governance

Dalam kerjasama pengembangan destinasi pariwisata pesisir, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dan beragam (Wirawan, 2016). Berikut ini adalah peran dan tanggung jawab pemerintah sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam partnership governance untuk pengembangan destinasi pariwisata

1. Perencanaan: Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan rencana strategis dan pengembangan destinasi pariwisata pesisir. Mereka harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti keberlanjutan lingkungan, potensi ekonomi, aspek sosial, dan kelestarian budaya dalam merencanakan

pengembangan pariwisata. Perencanaan ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kepentingan semua pihak terwakili.

2. Pengaturan dan regulasi: Pemerintah memiliki peran dalam mengembangkan kebijakan, peraturan, dan standar yang mengatur pengembangan dan operasional destinasi pariwisata pesisir. Mereka harus memastikan bahwa aktivitas pariwisata dilakukan secara bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, dan memperhatikan aspek lingkungan, keamanan, dan kenyamanan pengunjung.
3. Pengawasan: Pemerintah bertugas untuk mengawasi dan memantau aktivitas di destinasi pariwisata pesisir. Ini meliputi pemantauan terhadap kepatuhan terhadap peraturan, kualitas lingkungan, manajemen limbah, kelestarian alam, dan pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah juga harus melibatkan pemangku kepentingan dalam pemantauan ini untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pengembangan pariwisata pesisir.
4. Kebijakan dan regulasi: Pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang mendukung pengembangan destinasi pariwisata pesisir. Ini melibatkan pengembangan kebijakan terkait infrastruktur, investasi, perizinan, pajak, dan kebijakan lain yang berdampak pada pengembangan pariwisata. Kebijakan yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan.

5. Koordinasi antarinstansi: Pemerintah harus memastikan adanya koordinasi yang baik antara berbagai instansi dan lembaga terkait dalam pengembangan destinasi pariwisata pesisir. Ini melibatkan koordinasi antara kementerian, otoritas lokal, badan pariwisata, lembaga lingkungan, dan lembaga lainnya yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata. Koordinasi yang efektif akan memastikan sinergi, penggunaan sumber daya yang efisien, dan pencapaian tujuan bersama.

Dalam Partnership Governance, peran pemerintah sebagai mitra yang aktif dan bertanggung jawab sangat penting dalam mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata pesisir. Melalui perencanaan yang baik, pengaturan yang tepat, pengawasan yang ketat, kebijakan yang mendukung, dan koordinasi antarinstansi yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa pengembangan destinasi pariwisata pesisir dilakukan secara berkelanjutan, menguntungkan, dan memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan yang terlibat.

b) Peran Sektor Swasta dalam Partnership Governance

Sektor swasta memainkan peran yang penting dalam partnership governance dalam pengembangan destinasi pariwisata pesisir. Kontribusi mereka meliputi berbagai aspek, termasuk investasi, pengelolaan operasional, promosi, pemasaran, serta partisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pelestarian destinasi pariwisata pesisir (Rahmawati, 2017). Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang peran dan kontribusi sektor swasta dalam partnership governance untuk pengembangan destinasi pariwisata pesisir:

1. Investasi: Sektor swasta seringkali menjadi sumber utama investasi dalam pengembangan destinasi pariwisata pesisir. Mereka menyediakan modal yang diperlukan untuk membangun infrastruktur pariwisata seperti hotel, resor, restoran, dan fasilitas pendukung lainnya. Investasi sektor swasta membantu meningkatkan kapasitas pariwisata pesisir dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
2. Pengelolaan operasional: Sektor swasta berperan dalam pengelolaan operasional destinasi pariwisata pesisir. Mereka dapat mengelola akomodasi, tempat wisata, transportasi, dan layanan lainnya. Melalui manajemen yang efektif, sektor swasta dapat meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan pengalaman pengunjung, dan menjaga keberlanjutan operasional destinasi pariwisata pesisir.
3. Promosi dan pemasaran: Sektor swasta memiliki peran penting dalam promosi dan pemasaran destinasi pariwisata pesisir. Melalui kampanye pemasaran, kehadiran online, dan kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga pariwisata, sektor swasta dapat meningkatkan visibilitas dan daya tarik destinasi pariwisata pesisir. Hal ini membantu menarik minat wisatawan dan menghasilkan dampak positif bagi ekonomi lokal.
4. Kegiatan pembangunan dan pelestarian: Sektor swasta juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pelestarian destinasi pariwisata pesisir. Mereka dapat mendukung proyek-proyek pengembangan berkelanjutan, seperti pengelolaan limbah, konservasi lingkungan, dan pengembangan sumber daya manusia di sektor pariwisata.

Kontribusi ini membantu menjaga kelestarian alam, budaya, dan sosial di destinasi pariwisata pesisir.

Melalui peran dan kontribusi ini, sektor swasta dapat menjadi mitra penting dalam partnership governance (Hapsari, 2019). Kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya memungkinkan sinergi yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata pesisir yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi komunitas lokal dan lingkungan.

c) Peran Masyarakat Lokal dalam Partnership Governance

Masyarakat lokal memainkan peran yang krusial dalam partnership governance dalam pengembangan destinasi pariwisata pesisir. Partisipasi mereka mencakup pengambilan keputusan, pelibatan dalam kegiatan pariwisata, pemberdayaan ekonomi, dan upaya pelestarian budaya dan lingkungan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang peran dan partisipasi masyarakat lokal dalam partnership governance untuk pengembangan destinasi pariwisata pesisir:

1. Pengambilan keputusan: Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan destinasi pariwisata pesisir. Partisipasi mereka dalam forum-forum diskusi, konsultasi publik, dan mekanisme partisipasi lainnya memungkinkan mereka untuk menyampaikan pandangan, kepentingan, dan aspirasi mereka. Hal ini membantu memastikan keputusan yang diambil memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal.
2. Pelibatan dalam kegiatan pariwisata: Masyarakat lokal dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan pariwisata, seperti menjadi pemandu wisata,

pengelola homestay atau penginapan, pedagang lokal, atau produsen produk kerajinan lokal. Melalui pelibatan ini, masyarakat lokal dapat merasakan manfaat ekonomi langsung dari pariwisata dan ikut memperkaya pengalaman wisatawan dengan pengetahuan dan keunikan budaya setempat.

3. Pemberdayaan ekonomi: Partnership governance harus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pembangunan kapasitas untuk meningkatkan keterampilan dan pengembangan usaha masyarakat lokal. Pemberdayaan ekonomi yang kuat memungkinkan masyarakat lokal untuk memiliki peran yang lebih aktif dalam pengembangan pariwisata pesisir dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
4. Pelestarian budaya dan lingkungan: Masyarakat lokal juga memiliki tanggung jawab dalam melestarikan budaya dan lingkungan di destinasi pariwisata pesisir. Mereka dapat terlibat dalam kegiatan pelestarian warisan budaya, menjaga kebersihan lingkungan, dan mempromosikan praktek berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian budaya dan lingkungan memastikan keberlanjutan dan keaslian destinasi pariwisata pesisir.

Partisipasi aktif dan peran yang kuat dari masyarakat lokal dalam partnership governance memungkinkan mereka menjadi bagian yang penting dalam pengembangan destinasi pariwisata pesisir yang berkelanjutan dan berdampak positif. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan

keputusan, memberdayakan ekonomi mereka, dan memperkuat pelestarian budaya dan lingkungan, partnership governance dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal dan pariwisata secara keseluruhan (Handayani, 2018)

1. Ferryawan Z Fahmi, S.STP.,M.AP

   Beliau memiliki jabatan sebagai kepala Dinas Pariwisata setelah saya melakukan beberapa wawancara mengenai partnership governance yang dimana beliau memiliki tekad kuat untuk meningkatkan mutu dan indeks kerja dari Disparpora kabupaten bulukumba, mulai dari pemetaan beberapa lokasi yang dijadikan sebagai pariwisata di daerah bulukumba, selain itu beliau sangat penduli dengan beberapa aspirasi dari masyarakat kabupaten bulukumba mengenai beberapa penambahan konteks dalam mengikuti perkembangan tahun ke tahun. Alasan saya memilih bapak Ferryawan Z Fahmi sebagai salah satu informan saya adalah bagaimana kemudian saya bisa menggali beberapa aspek terpenting dari pengembangan ekonomi kreatif itu sendiri.

2. A. Aryono,S.IP., MM,Syamsul rijal, S.PD dan Andi Tenri Sanna, ST

   Beliau - beliau adalah informan saya mengenai database dan juga peran Disparpora itu sendiri dalam pengembangan di kabupaten Bulukumba khususnya, beberapa data penting terkait perkembangan beberapa tahun kebelakang dari ekonomi kreatif yang ada di kabupaten bulukumba mulai dari sklaa Umkm,kerajinan,beberapa tempat wisata tentunya yang menjadi figur dari Kabupaten bulukumba. Alasan saya memilih mereka menjadi informan saya karena dengan mendapatkan beberapa pengalaman-pengalaman mereka

dalam mengikuti beberapa pelatihan dan juga proses dari Disparpora kabupaten bulukumba mampu memberikan saya gambaran dalam proses penyelesaian studi saya.

3 . Bapak Alimuddin dan Ibu Rosdianawati

Mereka berdua adalah warga setempat yang tinggal di Desa Bira tempat saya melakukan penelitian. Bapak alimuddin tersendiri diakui sebagai petuah di daerah tersebut yang tahu betul bagaimana kemudian perkembangan dari ekonomi kreatif yang ada di desa tersebut mulai dari pariwisata di daerah bira sampai dengan beberapa buah tangan dari Desa bira yang selalu diperbincangkan bahkan sampai di mancaNegara. Ibu Rosdianawati sendiri merupakan salah satu pengunjung yang datang berwisata di Desa bira yang menjelaskan beberapa oleh-oleh yang menjadi incarannya dan juga tentunya beberapa objek wisata yang sangat memikat pandangan matanya sehingga ibu Rosdianawati memutuskan untuk berkunjung ke Desa Bira terkhusus di Daerah pantai Bira. Alasan saya memilih mereka menjadi informan saya adalah karena dengan mewawancarai beberapa warga lokal tentunya saya akan mendapatkan beberapa perbandingan dari beberapa sudut pandang yang bebeda-beda untuk melihat keuinikan Desa Bira dari beberapa sisi terutama dalam bidang Umkm yang kemudian menjadi perbincangan dengan pihak Disparpora.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pembangunan berbagai konsep dan teori yang digunakan dengan penelitian ini. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek

permasalahan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Objek yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah kawasan wisata Tanjung Bira dengan menggunakan analisis SWOT sebagai metode dalam meninjau lingkungan internal dan lingkungan eksternal dalam merancang formulasi strategi. Untuk lebih jelasnya berikut gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

Partnertship Governance Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Bulukumba

Faktor Pendukung

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
2. Penggunaan
3. Pemanfaatan
4. Pengembangan dan Pemeliharaan

(Kolinung elal, 2015)

Faktor Penghambat

▼

Efektivitas *Partnertship Governance* Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Bulukumba

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Proses partnership governance dalam Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba merupakan suatu langkah strategis yang melibatkan keterlibatan berbagai pihak terkait dengan tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kabupaten Bulukumba, sebagai contoh, mengadopsi pendekatan kolaboratif dalam mengembangkan sektor ekonomi	Pendukung utama dari proses partnership governance ini adalah sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Pemerintah daerah, sebagai pemangku	Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, pelaku

kreatif. Melibatkan pemangku kepentingan utama seperti pemerintah daerah, pelaku industri kreatif, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum, partnership governance menciptakan platform yang memungkinkan untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, dan tanggung jawab. Dalam proses ini, perencanaan kebutuhan dan penganggaran menjadi landasan penting untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif, memastikan proyek-proyek yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif mendapatkan dukungan optimal.	kebijakan, dapat menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan memfasilitasi kemitraan dengan pelaku bisnis.	usaha, dan masyarakat setempat.

Penggunaan	Factor pendukung	Factor penghambat
Indikator penggunaan dalam konteks ini mencakup optimalisasi sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif.	pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada integrasi berbagai pemangku kepentingan. Adanya dialog terbuka dan partisipasi aktif dari semua pihak diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam pengembangan ekonomi kreatif	aspek regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan ekonomi kreatif, khususnya di sektor pariwisata, turut menjadi penghambat.

Pemanfaatan	Factor pendukung	Factor penghambat
Partnership governance dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba merupakan pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan program yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Dalam konteks ini, indikator	Pemanfaatan dapat diukur dari seberapa efektifnya pihak-pihak terlibat memanfaatkan sumber daya, infrastruktur, dan dukungan kelembagaan untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif.	Ketidakpastian mengenai peraturan dan perizinan dapat menghambat investasi dan pertumbuhan industri kreatif di Kabupaten Bulukumba.

pemanfaatan menjadi krusial untuk mengukur sejauh mana hasil kerjasama tersebut diimplementasikan dan memberikan dampak positif.		

Pengembangan dan pemeliharaan	Faktor pendukung	Factor penghambat
Partnership governance dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba merupakan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai tujuan pengembangan dan pemeliharaan sektor ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Indikator pengembangan melibatkan peningkatan jumlah dan kualitas pelaku usaha kreatif, penguatan infrastruktur pendukung seperti ruang kerja bersama dan fasilitas umum, serta promosi produk kreatif lokal.	Kabupaten Bulukumba menetapkan evaluasi kinerja dan transparansi sebagai fondasi utama dalam Pengembangan dan Pemeliharaan Aset melalui pendekatan partnership governance.	Faktor penghambat dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba adalah keterbatasan sumber daya finansial

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari bagan kerangka pikir di atas, maka fokus dalam penelitian ini mengenai *Partnertship Governance* Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Bulukumba dalam pengembangan ParawisataDi Kabupaten Bulukumba.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Kepemimpinan (*leadership*)

   Kepemimpinan memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merujuk pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah berdasarkan kreativitas, pengetahuan, dan keahlian.

2. Konsekuensial Insentif (*conseqential incentives*)

   Konsekuensial Insentif (Consequential Incentives) berkaitan dengan cara memberikan insentif atau dorongan kepada individu atau kelompok untuk mendorong perilaku yang diinginkan, dengan menghubungkan insentif tersebut secara langsung dengan hasil atau konsekuensi dari tindakan atau keputusan yang diambil. Dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif.

3. Interdepensi (*interdependence*)

   Interdependensi (Interdependence) mengacu pada hubungan timbal balik antara individu, kelompok, atau entitas dalam suatu sistem. Dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif, teori ini menyoroti pentingnya kerjasama, kolaborasi, dan ketergantungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkan produk, layanan, atau inovasi kreatif.

4. Ketidakpastian (*uncertainty*)

Ketidakpastian (Uncertainty) dalam pengembangan ekonomi politik mengacu pada konsep bahwa lingkungan politik dan ekonomi sering kali penuh dengan ketidakpastian, di mana aktor-aktor ekonomi harus mengambil keputusan dan merencanakan tindakan mereka dalam situasi di mana hasilnya sulit diprediksi. Ini dapat mencakup aspek-aspek seperti perubahan regulasi, kebijakan publik yang tidak stabil, pergeseran politik, dan faktor-faktor lain yang sulit untuk dipahami sepenuhnya.

5. Faktor pendukung

Teori ini fokus pada peran sumber daya dan kapabilitas yang tersedia dalam konteks Partnership Governance. Anda dapat menganalisis bagaimana akses ke sumber daya fisik, finansial, dan manusia yang memadai dapat mendukung kemitraan yang efektif.

6. Faktor penghambat

Teori ini mengacu pada hambatan yang muncul sebagai akibat dari struktur dan kebijakan institusi. Faktor-faktor seperti peraturan yang kompleks, birokrasi yang lambat, atau kebijakan yang tidak selaras dapat menjadi penghambat dalam implementasi Partnership Governance.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan setelah seminar proposal dan setelah surat izin penelitian dikeleuarkan. Lokasi penelitian berada pada Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas terkait *Partnertship Governance* Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Bulukumba.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Untuk memastikan bahwa topik kajian sejalan dengan kenyataan di lapangan, landasan teori digunakan sebagai pedoman (Sugiyono, 2012).

Teknik penelitian yang dimaksud adalah berinteraksi dengan informan, mempelajarinya, dan mencoba memahami bahasa dan sudut pandang mereka. Untuk alasan ini, peneliti harus menghabiskan banyak waktu bekerja di lapangan secara langsung.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan

gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan. masalah yang diteliti terkait partnertship governance dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba.

Dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, penelitian deskriptif menyajikan gambaran umum dan melakukan pengamatan dari suatu penelitian. begitu juga dengan penelitian tentang *partnertship governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba di mana penelitian ini turun langsung ke lapangan dan melakukan pengamatan terhadap subjek.

C. Sumber Data

Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data Primer (data utama). Data primer dapatkan secara langsung di lokasi penelitian yaitu Kantor Dinas terkait. Data tersebut peneliti dapatkan melalui wawancara dengan informan yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap suatu objek penelitian.
2. Data Sekunder Sekunder (data pendukung). Sumber data awal dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang peneliti dapatkan melalui dokumen, peraturan-peraturan serta laporan yang berhubungan langsung dengan peran pemerintah daerah dalam pengembangan Ekonomi Kreatif. Data sekunder tersebut peneliti dapatkan di Kantor Dinas terkait penelitian.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive samping* yakni penentuan informan tidak berdasarkan pada strata maupun kedudukan tetapi didasarkan pada

sumber data, tujuan dan pertimbangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Penentuan informan atau responden penelitian sangat penting karena sebagai *key informant.* Informan penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian terkait dengan Pengembangan ekonomi Kreatif Di Kabupaten Bulukumba. Adapun informan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

No	Informan Penelitian
1.	Kepala Dinas Disparpora
2.	Pengelola Objek Wisata
3.	Wisatawan
4.	Masyarakat Sekitaran Objek Wisata

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara menggunakan teknik Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

1. Observasi, pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati lokasi tempat penelitian yaitu di Kantor Dinas Terkait. Hasil dari observasi ini sangat membantu karena mengetahui langsung bagaimana peran Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

2. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data primer (data utama) yaitu peneliti melakukan dengan metode wawancara secara langsung dengan beberapa informan yang terkait seperti Pegawai Kantor Dinas. Adapun wawancara tersebut dilakukan guna mempertanyakan mengenai Peran Pemerintah daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif. dengan menggunakan indikator dari fungsi peran. Adapun hasil wawancara

tersebut, penulis dapat mengetahui dan mendeskrpsikan bagaimana Peran Pemerintah dalam pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Bulukumba.

3. Dokumentasi, dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara peneliti mengumpulkan data dan informasi penunjang dari berbagai sumber baik berupa dokumen resmi, visual maupun tulisan serta laporan, jurnal-jurnal, peraturan, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dokumentasi tersebut sangat dibutuhkan sebagai penunjang data dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian ini. Dokumentasi berupa gambar sangat diperlukan sebagai bukti terlaksananya penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, teknik analisis ini memaparkan kenyataan yang peneliti peroleh dari lapangan kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai dengan aturan dan mekanisme penulisan skripsi. Adapun komponen dalam analisis data yaitu:

1. Redaksi Data, telah melaksanakan penelitian dengan memilih dan meringkas informasi yang dianggap sesuai maupun tidak sesuai dari hasil wawancara informan maupun dokumentasi yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.
2. Penyajian Data, yang penulis lakukan dengan membuat uraian penjelasan atau narasi serta tabel. Penyajian data tersebut berdasarkan informasi yang sesuai dengan penelitian. Dengan melakukan penyajian data dapat

memudahkan untuk mengetahui apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman peneliti.

3. Penarikan Kesimpulan, dilakukan secara teliti dan cermat dengan menggunakan teknik verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan sehingga data tersebut dapat diuji validasinya. Dimana penelitian valid yang bersifat masuk akal, kredibel dan dapat dipercaya. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan melibatkan hasil reduksi data tetap memacu pada rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada .

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan ini benar-benar merupakan suatu penelitian ilmiah untuk menguji data yang diperoleh. Adapun teknik pengabsahan data terdiri dari tiga yakni tringuasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu, adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan**.**
2. Triangulasi Teknik yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebihvalid sehingga lebih kredibel.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah Kabupaten Bulukumba

Untuk mengetahui kondisi Geografis dan Administrasi wilayah Kabupaten Bulukumba dapat dilihat sebagai berikut ;

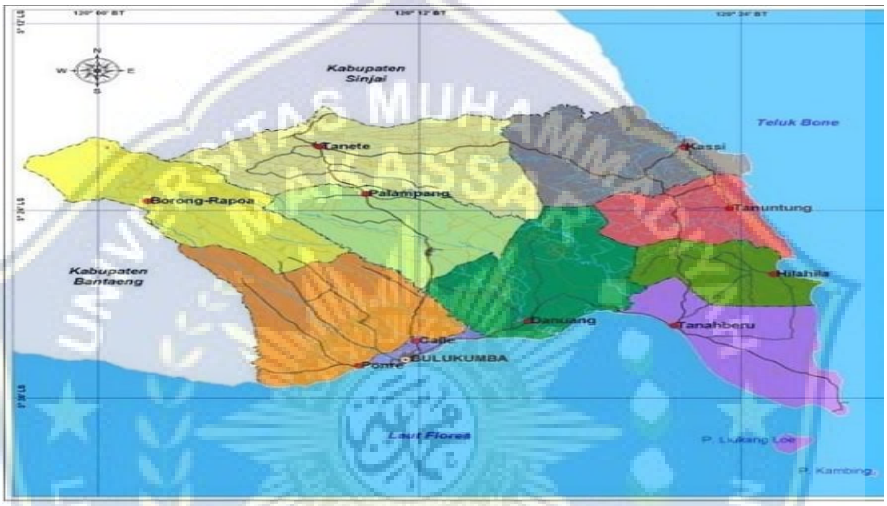

Sumber ; https://peta-hd.com/peta-kabupaten-bulukumba-gambar-wilayah-administrasi/

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Ujung Bulu. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bulukumba tahun 2021, Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154,58 km² dan berpenduduk 437.610 jiwa. Kabupaten Bulukumba terdiri atas 10 kecamatan, 27 kelurahan, serta 109 desa.

Secara wilayah, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng–Lompobattang, dataran rendah, pantai, dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal

dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,58 km² dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 km.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20” sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur. Batas-batas wilayahnya adalah:

- Sebelah Utara: Kabupaten Sinjai
- Sebelah Selatan: Kabupaten Kepulauan Selayar
- Sebelah Timur: Teluk Bone
- Sebelah Barat: Kabupaten Bantaeng.

Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai

bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka dataran tinggi mencapai 49,72%.

2. Profil Disparpora Kabupaten Bulukumba

Kantor Dinas Disparpora Kabupaten Bulukumba dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Disparpora terletak di Jl. Lanto Dg. Pasewang, No.31 Kelurahan Caile, Kecematan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Disparpora adalah satuan kerja yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan dibidang kepariwisataan secara efektif, efisien, akuntabel dan profesional.

Seperti yang diamanatkan dalam peraturan bupati bulukumba nomor 136 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Disparpora. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pariwista, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba mempunyai fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Disparpora
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dibidang Disparpora
4. Pelaksanaan administrasi dinas
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Visi dan Misi Dinas Disparpora Visi Dan Misi OPD (Operasi Perangkat Daerah) merupakan pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Visi adalah pandangan ideal kedepan yang ingin diwujudkan dalam kurung waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan kewenangan otonomi daerah bidang Disparpora sebagai antsipasi perkembangan lingkungan strategis dan era globalisasi. Dengan memperhatikan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021 serta pantangan pembangunan kepariwisataan kedepan. Yang menjadi Visi dari Dinas Disparpora adalah Menggapai Masyarakat sejahtera melalui pengembangan kepariwisataan (*Tourism and Culture Development For Prosperity*) dengan berlandaskan pada nili religi dan kearifan lokal. Dimana Visi ini mengandung Arti sebagai berikut.

1. Kepariwisataan merupakan salah satu sektor andalan Kabupaten Bulukumba yang perlu mendapatkan prioritas, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah maupun pendapatan masyarakat.
2. Sebagai upaya pengembangan kepariwisataan dengan obyek sasaran pada pemanfaatan sumber daya alam, pelestarian nilai-nilai budaya sebagai daya tarik wisata.
3. Sebagai perwujudan daerah tujuan wisata andalan Sulawesi Selatan, mka sektor kepariwisataan menjadi salah satu bidang andalan untuk menopang peningkatan perekonomian untuk menggapai masyarakat yang sejahtera.

4. Nilai religi dan kearifan lokal menjadi landasan yang kokoh dalam pengembangan kepariwisataan yang akuntabel dan transparan.

Misi adalah pernyatan mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan, sejalan upaya pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi objektif. Maka misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bulukumba adalah:

1. Mengembangkan destinasi Disparpora potensial yang berkelanjutan dan terencana
2. Menerapkan suatu sistem pemasaran yang inovatif dan bertanggung jawab
3. Mengembangkan industri Disparpora untuk peningkatan ekonomi daerah
4. Mengembangkan kapasitas sumber daya kepariwisataan yang berdaya saing
5. Menciptakan tata kelembagaan yang akuntabel, transparan, dan responsive.

4. Susunan Organisasi dan Tugas Dinas Disparpora

Berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 136 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata cara kerja Dinas Disparpora terdiri atas:

1. Kepala Dinas Disparpora dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dimana Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Disparpora berdasarkan perundang-

undangan yang berlaku. Adapun uraian tugas Kepala Dinas Disparpora adalah sebagai berikut.

a. Merencanakan program kerja lingkup Dinas Disparpora sebagai pedoman pelaksanaan tugas
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas Disparpora untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya
f. Merumuskan kebijakan pemerintah daerah bidang pengembangan destinasi Disparpora , pemasaran, pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
g. Merumuskan sasaran kebijakan pemerintah
h. Menyelenggarakan pengembangan sesuai potensi daerah
i. Menyelenggarakan pembinaan kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
j. Mengoordinasikan bidang pengembangan destinasi Disparpora, pemasaran, pengembangan sumber daya kepariwisataan dan

ekonomi kreatf, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan sesuai rencana strategis

k. Mengoordinaskan penyelenggaraan dan memantau perkembangan bidangnya

l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi kebijakan teknis kepariwisataan, pemuda dan olahraga

m. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan

n. Menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturang perundangundangan

o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas Disparpora dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Dinas Disparpora sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas ini, sekretaris mempunyai fungsi:

a. Pengordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas
b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan
c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian dan hukum
d. Pengoordinasian administrasi keuangan
e. Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya

1. Sub Bagian Program

Sub bagian program dipimpin oleh Kepala Sub baagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data, dan penyusunan laporan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian

Sub bagian umum dan kepagawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.

3. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan administrasi dan pelaopran keuangan

1. Bidang Pengembangan Destinasi

Pariwisata Bidang pengembangan destinasi Disparpora dipimpin oleh Kepala Bidang yng mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, dan pengoordinasian penyusunan program serta kegiatan serta membantu dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengembangan destinasi Disparpora . Adapun fungsi Kapala Bidang pengembangan destinasi Disparpora adalah sebagai berikut.

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan destinasi Disparpora
b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengembangan destinasi Disparpora
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan destinasi Disparpora
d. Pelaksanaan administrasi lingkup bidang pengembangan destinasi Disparpora
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan Disparpora.

2. Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

Bidang pemasaran, pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan

kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan sert pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala bidang pemasaran, pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif melaksanakan fungsi sebagai berikut.

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemasaran, pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif
b. Pelaksanaan kebijkan teknis
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemasaran, pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif
d. Pelaksanaan administrasi lingkup dibidang tersebut
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan

Bidang kepemudaan dan kepramukaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala bidang kepemudaan dan kepramukaan melaksanakan fungsi sebagai berikut.

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan kepramukaan
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan kepramukaan

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan dan kepramukaan

d. Pelaksanaan administrasi bidang kepemudaan dan kepramukaan e.

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Bidang Keolahragaan

Bidang keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam penyiapan pengoordinasia perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta memantau dan mengvaluasi penyelenggaraan urusan keolaragaan lingkup Dinas Disparpora. Kepala bidang keolaragaan melaksanakan fungsi sebagai berikut.

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang keolaragaan

b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang keolahragaan

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang keolahragaan

d. Pelaksanaan administrasi dibidang keolahragaan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

B. Hasil penelitian

Proses partnership governance dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba merupakan serangkaian langkah terencana untuk membangun kerja sama efektif antara berbagai pihak yang terlibat. Tahap awal melibatkan identifikasi potensi ekonomi kreatif di daerah tersebut, yang kemudian diikuti dengan pemilihan mitra strategis seperti pemerintah daerah, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal. Pembentukan struktur kemitraan menjadi langkah berikutnya, dengan perjanjian kerjasama dan kesepakatan bersama mengenai tanggung jawab dan hak masing-masing pihak. Tujuan bersama yang mencakup pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pelestarian budaya lokal ditetapkan sebagai landasan kerja sama. Melibatkan komunitas lokal sebagai pemangku kepentingan utama dan membentuk forum diskusi dan konsultasi menjadi prioritas untuk meningkatkan partisipasi dan komunikasi. Monitoring dan evaluasi berkala diimplementasikan guna mengukur kemajuan inisiatif dan memastikan kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemberdayaan masyarakat lokal, advokasi bersama, dan pemasaran bersama juga menjadi fokus untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

Proses ini terus dievaluasi dan disesuaikan demi keberlanjutan dan keberhasilan inisiatif di Kabupaten Bulukumba untuk memperjelas dari hasil penelitian ini peneliti menggunkan 4 indikator sebagai dasar dalam penegmebagan skripsi ini dan adapun indicator tersebut diataranya Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengembangan dan Pemeliharaan

adapaun hasil di dapat di lapangan dengan menggunakan beberapa indicator tersebut dengan menggunakan metode penelitian kuali tatif sebagai berikut :

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Proses partnership governance dalam Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba merupakan suatu langkah strategis yang melibatkan keterlibatan berbagai pihak terkait dengan tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kabupaten Bulukumba, sebagai contoh, mengadopsi pendekatan kolaboratif dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Melibatkan pemangku kepentingan utama seperti pemerintah daerah, pelaku industri kreatif, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum, partnership governance menciptakan platform yang memungkinkan untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, dan tanggung jawab. Dalam proses ini, perencanaan kebutuhan dan penganggaran menjadi landasan penting untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif, memastikan proyek-proyek yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif mendapatkan dukungan optimal. Keputusan bersama, transparansi, dan akuntabilitas menjadi inti dari partnership governance ini, membentuk kerangka kerja yang kuat untuk memajukan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba menuju arah yang berkelanjutan dan inklusif.

Adapun pendapat dari sala satu informan tentang Proses partnership governance dalam Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

Dari apa yang saya ketahui selama ini Proses partnership governance dalam

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba melibatkan kolaborasi intensif antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Kami fokus pada keterlibatan aktif semua pihak untuk memastikan kebutuhan dan alokasi anggaran yang efektif dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.

(Wawancara, FZ. /17 /12 / 2023)

Adapun pendapat dari salatu informan mengugkapkan bahwa Proses partnership governance dalam Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba melibatkan kolaborasi erat antara tiga pihak utama: pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Fokus utamanya adalah memastikan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait, dengan tujuan untuk mencapai kebutuhan dan alokasi anggaran yang efektif dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Beberapa poin kunci yang dapat diinterpretasikan dari pernyataan tersebut meliputi: Kolaborasi Intensif Proses ini didesain untuk mendorong kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya partisipasi dan kontribusi semua pihak terlibat. Keterlibatan Aktif: Ada penekanan pada keterlibatan yang aktif dari semua pihak, menyoroti bahwa setiap entitas memiliki peran yang signifikan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Ini dapat mencakup partisipasi dalam diskusi, pengambilan keputusan, dan implementasi proyek. Efektivitas dalam Mendukung Pertumbuhan: Proses ini tidak hanya berfokus pada perencanaan dan penganggaran sebagai tujuan akhir, tetapi juga pada efektivitas kebijakan dan tindakan yang diambil untuk mendukung

pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Hasil yang diharapkan adalah pencapaian tujuan pembangunan ekonomi kreatif secara optimal. Alokasi Anggaran yang Efektif: Pencapaian tujuan tersebut ditekankan melalui alokasi anggaran yang efektif. Artinya, setiap pengeluaran diarahkan dengan cermat untuk memastikan dampak maksimal terhadap perkembangan sektor ekonomi kreatif. Pentingnya Sektor Ekonomi Kreatif: Proses ini memiliki orientasi khusus pada pengembangan sektor ekonomi kreatif. Ini dapat mencakup industri seperti seni, budaya, desain, teknologi kreatif, dan sejenisnya, yang dianggap sebagai sumber potensial pertumbuhan ekonomi. Pendeknya, Proses partnership governance ini tampaknya menjadi pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak yang relevan dalam upaya untuk merencanakan dan mengalokasikan anggaran secara efektif guna mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang Proses partnership governance dalam Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Kalau yang saya pahami dari pengalaman dimana Partnership governance dalam konteks Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba menerapkan pendekatan inklusif. Dalam proses ini, kami memastikan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri kreatif, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memastikan rencana dan anggaran mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya.
> (Wawancara, AA. /18 /12 / 2023)

Dalam wawancara yang dilakukan mengenai Partnership governance dalam konteks Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba, terungkap bahwa pendekatan inklusif

menjadi landasan utama dalam pelaksanaannya. Menurut narasumber, pengalaman yang mereka dapatkan menunjukkan bahwa keberhasilan Partnership governance sangat bergantung pada keterlibatan semua pemangku kepentingan terkait. Dalam hal ini, mereka secara khusus memastikan partisipasi pelaku industri kreatif, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Tujuan utama dari melibatkan kelompok-kelompok ini adalah untuk memastikan bahwa rencana dan anggaran yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata yang ada dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba. Pendekatan inklusif ini tidak hanya dianggap sebagai strategi efektif, tetapi juga sebagai langkah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam merencanakan dan menganggarkan sumber daya yang dibutuhkan dalam memajukan sektor ekonomi kreatif di daerah tersebut.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang Proses partnership governance dalam Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Apa yang selama ini terjadi dari sudut pandang saya dan yang saya pahami Dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba, partnership governance dalam Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran melibatkan pembentukan kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor swasta. Kolaborasi ini membantu mengidentifikasi peluang dan risiko yang mungkin timbul, serta memastikan alokasi anggaran yang tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.
>
> (Wawancara, SR. /18 /12 / 2023)

Dalam wawancara terkait pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba, terungkap bahwa pendekatan partnership governance menjadi kunci utama dalam merancang Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran. Melibatkan

pemerintah dan sektor swasta dalam kemitraan strategis telah membawa dampak positif dalam mengidentifikasi peluang dan risiko yang dapat muncul di sektor ekonomi kreatif. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat sinergi antara dua sektor tersebut, tetapi juga memastikan bahwa alokasi anggaran yang diberikan sesuai dan efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Adanya dialog terbuka dan berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif memberikan landasan kokoh bagi pengambilan keputusan yang terinformasi dan responsif terhadap dinamika pasar serta perkembangan industri kreatif. Dengan demikian, partnership governance tidak hanya menjadi strategi pelaksanaan, tetapi juga menjadi landasan kuat bagi pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang Proses partnership governance dalam Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Proses partnership governance dalam Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba didasarkan pada prinsip keterlibatan komprehensif. Melalui dialog terbuka dan berkesinambungan antara pemerintah, pelaku industri, dan komunitas lokal, kami menciptakan strategi yang dapat memenuhi kebutuhan sektor ekonomi kreatif dengan tepat.
> (Wawancara, AT. /19 /12 / 2023)

Proses partnership governance dalam Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba memiliki dasar pada prinsip keterlibatan komprehensif. Dalam wawancara ini, pihak terlibat menyampaikan bahwa melalui dialog terbuka dan berkesinambungan antara pemerintah, pelaku industri, dan komunitas lokal,

mereka berhasil menciptakan strategi yang dapat memenuhi kebutuhan sektor ekonomi kreatif dengan tepat. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk menggandeng berbagai pemangku kepentingan dalam sebuah kolaborasi yang efektif dan inklusif. Dengan demikian, proses perencanaan dan penganggaran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan kontribusi dan pandangan berharga dari para pelaku industri dan komunitas lokal. Hasilnya diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas dan berkelanjutan bagi perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang Proses partnership governance dalam Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Partnership governance dalam konteks Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba menjadi landasan utama untuk memastikan sinergi di antara semua pemangku kepentingan. Dengan melibatkan lembaga pemerintah, sektor swasta, dan kelompok masyarakat, kami merancang rencana yang berfokus pada pencapaian hasil yang berkelanjutan dan inklusif di bidang ekonomi kreatif.
> (Wawancara, An. /20 /12 / 2023)

Dalam wawancara ini, pembicara menyoroti pentingnya Partnership Governance dalam konteks Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba. Menurutnya, partnership governance menjadi landasan utama untuk memastikan sinergi di antara semua pemangku kepentingan yang terlibat. Untuk mencapai hal ini, pembicara menyatakan bahwa melibatkan lembaga pemerintah, sektor swasta, dan kelompok masyarakat merupakan langkah kunci dalam merancang rencana pembangunan. Fokus utama dari rencana tersebut adalah pencapaian hasil yang

berkelanjutan dan inklusif di bidang ekonomi kreatif. Dengan demikian, melalui keterlibatan berbagai pihak, diharapkan dapat terwujud kerjasama yang saling mendukung untuk mewujudkan potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba.

2. Penggunaan

Partnership governance dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba merupakan suatu pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Indikator penggunaan dalam konteks ini mencakup optimalisasi sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif. Penekanan pada penggunaan sumber daya secara efektif dapat mencakup pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam industri kreatif, pengembangan infrastruktur yang mendukung kreativitas, serta pemanfaatan teknologi untuk memasarkan produk dan layanan kreatif secara lebih luas. Dengan demikian, partnership governance di Kabupaten Bulukumba diarahkan untuk mencapai sinergi antara berbagai pihak dalam upaya meningkatkan ekonomi kreatif dengan menggunakan indikator penggunaan yang terukur dan berkelanjutan.

Adapun pendapat dari sala satu informan tentang Penggunaan aset yang di manfaatkan dalam proses *partnertship governance* untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Dalam proses partnership governance untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba, penggunaan aset menjadi kunci

> utama. Kami fokus pada optimalisasi aset yang ada, termasuk lahan, fasilitas, dan sumber daya lainnya, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.
> (Wawancara, FZ. /17 /12 / 2023)

Dalam wawancara mengenai proses partnership governance untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba, dikemukakan bahwa penggunaan aset menjadi kunci utama dalam strategi tersebut. Fokus utama terletak pada optimalisasi aset yang sudah ada, seperti lahan, fasilitas, dan sumber daya lainnya. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menciptakan lingkungan yang optimal dan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Melalui sinergi antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, pelaku industri kreatif, dan masyarakat, diharapkan dapat terbentuk kemitraan yang kuat untuk merencanakan dan melaksanakan inisiatif pengembangan ekonomi kreatif. Dengan memanfaatkan aset-aset yang ada secara efisien, diharapkan Kabupaten Bulukumba dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang Penggunaan aset yang di manfaatkan dalam proses *partnertship governance* untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Aset merupakan fondasi utama dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba melalui partnership governance. Kami melakukan analisis mendalam terhadap aset yang tersedia, mengidentifikasi potensinya, dan merancang strategi penggunaan yang cerdas untuk mencapai sinergi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat lokal.
> (Wawancara, AA. /18 /12 / 2023)

Dalam wawancara ini, terungkap bahwa aset menjadi fondasi utama dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba melalui konsep partnership governance. Tim kami telah melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aset yang tersedia di wilayah ini. Langkah pertama yang diambil adalah mengidentifikasi potensi yang terkandung dalam aset tersebut. Dari hasil identifikasi tersebut, kami kemudian merancang strategi penggunaan yang cerdas dan terencana. Tujuan utamanya adalah mencapai sinergi yang optimal antara pemerintah daerah, pelaku bisnis, dan masyarakat lokal. Dengan pendekatan partnership governance, kami percaya bahwa kolaborasi yang kokoh dan terarah antara berbagai pihak dapat memacu pertumbuhan ekonomi kreatif secara berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba. Melalui langkah-langkah ini, kami yakin bahwa potensi ekonomi kreatif daerah ini dapat benar-benar dioptimalkan untuk kesejahteraan bersama.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang Penggunaan aset yang di manfaatkan dalam proses *partnertship governance* untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Dalam konteks partnership governance di Kabupaten Bulukumba, aset digunakan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Kami melakukan pemetaan aset, baik fisik maupun non-fisik, dan mengintegrasikannya ke dalam kebijakan kolaboratif yang memberdayakan pelaku ekonomi kreatif setempat.
> (Wawancara, SR. /18 /12 / 2023)

Dalam wawancara ini, terungkap bahwa di Kabupaten Bulukumba, partnership governance diimplementasikan dengan mengutamakan peran aset

sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Pendekatan ini melibatkan pemetaan aset secara menyeluruh, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Pemetaan ini tidak hanya sebagai langkah administratif semata, melainkan sebagai dasar untuk mengintegrasikan aset-aset tersebut ke dalam kebijakan kolaboratif. Tujuan utamanya adalah memberdayakan pelaku ekonomi kreatif setempat agar dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki. Langkah-langkah konkret seperti mengidentifikasi dan mengelompokkan aset, serta merumuskan kebijakan yang mendukung kolaborasi antarpihak terlibat, menjadi fokus dalam upaya ini. Dengan demikian, Kabupaten Bulukumba berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif melalui optimalisasi pemanfaatan aset-aset yang dimiliki.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang Penggunaan aset yang di manfaatkan dalam proses *partnertship governance* untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Penggunaan aset menjadi pilar utama dalam praktek partnership governance untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba. Kami mengadopsi pendekatan yang berfokus pada pemanfaatan efisien dan berkelanjutan dari aset, termasuk infrastruktur, keahlian lokal, dan kekayaan budaya, untuk merangsang pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.
> (Wawancara, Ri. /20 /12 / 2023)

Dalam wawancara yang dilakukan, terungkap bahwa Kabupaten Bulukumba mengambil pendekatan inovatif dengan menjadikan penggunaan aset sebagai pilar utama dalam praktek partnership governance untuk pengembangan ekonomi kreatif. Dalam konteks ini, aset tidak hanya terbatas pada infrastruktur, tetapi juga

mencakup keahlian lokal dan kekayaan budaya. Para pemangku kepentingan di Kabupaten Bulukumba sepakat bahwa pendekatan ini menekankan pada pemanfaatan efisien dan berkelanjutan dari berbagai aset tersebut. Dengan menggabungkan infrastruktur yang ada, keahlian masyarakat lokal, dan kekayaan budaya yang dimiliki, mereka berupaya merangsang pertumbuhan sektor ekonomi kreatif secara holistik. Dengan demikian, Kabupaten Bulukumba berusaha menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan kreativitas dan inovasi, membangun dasar yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah mereka.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang Penggunaan aset yang di manfaatkan dalam proses *partnertship governance* untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Dalam upaya meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba, kami menjadikan aset sebagai katalisator utama dalam kerangka partnership governance. Kami menggali potensi penuh dari aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat secara keseluruhan.
> (Wawancara, AT. /19 /12 / 2023)

Dalam wawancara terkait upaya meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba, subjek utama pembicaraan adalah penggunaan aset sebagai katalisator utama dalam konteks partnership governance. Ditekankan bahwa pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya secara aktif menggali potensi penuh dari aset-aset yang dimiliki. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah memberikan dampak positif yang signifikan bagi pelaku ekonomi kreatif dan

masyarakat secara menyeluruh.

Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba berkomitmen untuk mengoptimalkan peran aset sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi kreatif. Melalui partnership governance, terjadi kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan pihak terkait, termasuk pelaku ekonomi kreatif lokal. Proses ini melibatkan identifikasi, penilaian, dan pemanfaatan aset-aset yang ada, seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan potensi kreatif lokal.

Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Dengan memaksimalkan nilai aset yang ada, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi yang lebih luas. Pemerintah daerah meyakini bahwa investasi dalam ekonomi kreatif bukan hanya menguntungkan sektor tersebut, tetapi juga memiliki dampak positif yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Selain itu, dalam konteks partnership governance, pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada integrasi berbagai pemangku kepentingan. Adanya dialog terbuka dan partisipasi aktif dari semua pihak diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam pengembangan ekonomi kreatif. Langkah-langkah ini tidak hanya diarahkan pada peningkatan daya saing ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat lokal untuk turut serta dalam proses pembangunan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pendekatan ini mencerminkan komitmen serius pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba untuk mewujudkan pembangunan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan fokus pada pemanfaatan

aset sebagai katalisator utama, diharapkan Kabupaten Bulukumba dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam merancang strategi pengembangan ekonomi kreatif yang holistik dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.

3. Pemanfaatan

Partnership governance dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba merupakan pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan program yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Dalam konteks ini, indikator pemanfaatan menjadi krusial untuk mengukur sejauh mana hasil kerjasama tersebut diimplementasikan dan memberikan dampak positif. Pemanfaatan dapat diukur dari seberapa efektifnya pihak-pihak terlibat memanfaatkan sumber daya, infrastruktur, dan dukungan kelembagaan untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif. Hal ini mencakup pengelolaan inovasi, pemberdayaan masyarakat lokal, serta upaya bersama dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Bulukumba.

Adapun pendapat dari sala satu informan tentang pemanfaatan aset yang dilakukan selama ini dalam proses *partnertship governance* untuk pengembangan ekonomikreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Kami telah mengoptimalkan pemanfaatan aset dengan melakukan inventarisasi dan pemetaan aset kreatif di Kabupaten Bulukumba. Melalui data ini, kami dapat mengidentifikasi potensi aset yang dapat diintegrasikan dalam strategi partnership governance untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif.
> (Wawancara, AA. /18 /12 / 2023)

Dalam hasil wawancara, kami menemukan bahwa Kabupaten Bulukumba

telah berhasil mengoptimalkan pemanfaatan aset melalui proses inventarisasi dan pemetaan aset kreatif. Langkah ini memungkinkan kami untuk mengakses data yang akurat dan terkini mengenai aset kreatif di wilayah tersebut. Dengan adanya informasi ini, kami dapat mengidentifikasi potensi aset yang strategis dan dapat diintegrasikan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah melalui strategi partnership governance, di mana kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dapat ditingkatkan. Dengan melibatkan komunitas lokal, pemerintah daerah, dan sektor swasta, kami berharap dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba. Melalui integrasi aset yang telah diidentifikasi, diharapkan bahwa strategi ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang pemanfaatan aset yang dilakukan selama ini dalam proses *partnertship governance* untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Dalam rangka partnertship governance, kami telah mengimplementasikan strategi kolaboratif dengan pihak terkait untuk memaksimalkan pemanfaatan aset. Langkah-langkah ini termasuk pembentukan kemitraan strategis dengan pelaku ekonomi kreatif lokal, pemangku kepentingan, dan lembaga terkait untuk memastikan sinergi yang efektif dalam pengembangan ekonomi kreatif.
> (Wawancara, SR. /18 /12 / 2023)

Dalam wawancara terkait inisiatif partnertship governance, kami telah menjelaskan implementasi strategi kolaboratif yang telah kami terapkan untuk

memaksimalkan pemanfaatan aset. Sebagai langkah awal, kami telah membentuk kemitraan strategis dengan pelaku ekonomi kreatif lokal, yang melibatkan berbagai sektor industri. Kolaborasi ini dirancang untuk menciptakan lingkungan sinergis yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah ini. Kami juga secara aktif melibatkan pemangku kepentingan dan lembaga terkait dalam upaya ini, dengan tujuan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif. Melalui pendekatan ini, kami yakin bahwa sinergi yang efektif dapat dicapai, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif di komunitas lokal kami.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang pemanfaatan aset yang dilakukan selama ini dalam proses *partnertship governance* untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Melalui pengelolaan aset yang terkoordinasi, kami telah menciptakan platform terbuka bagi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba. Ini mencakup penyediaan ruang kolaboratif, sumber daya bersama, dan akses ke fasilitas yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.
> (Wawancara, AT. /19 /12 / 2023)

Melalui hasil wawancara, terungkap bahwa melalui pengelolaan aset yang terkoordinasi, telah terbentuk sebuah platform terbuka bagi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba. Pendekatan ini melibatkan penyediaan ruang kolaboratif, sumber daya bersama, dan fasilitas pendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Dengan demikian, upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang merangsang inovasi dan kolaborasi di antara para pelaku

ekonomi kreatif, dengan harapan dapat meningkatkan daya saing dan memperkuat kontribusi sektor ini terhadap pembangunan lokal. Dalam konteks ini, platform tersebut menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara berbagai entitas dalam ekosistem ekonomi kreatif, sekaligus memberikan akses yang lebih mudah dan terstruktur terhadap sumber daya yang diperlukan.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang pemanfaatan aset yang dilakukan selama ini dalam proses *partnertship governance* untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Upaya kami dalam partnertship governance melibatkan pengembangan program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif. Dengan memanfaatkan aset dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan, kami berusaha meningkatkan kapasitas mereka untuk menciptakan nilai tambah dalam ekonomi kreatif.
> (Wawancara, An. /20 /12 / 2023)

Dalam wawancara ini, kami mendalami upaya kami dalam menerapkan partnership governance, yang berfokus pada pengembangan program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif. Kami meyakini bahwa melalui pemanfaatan aset berupa pengetahuan dan keterampilan, kami dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan sektor ini. Dengan memahami bahwa pelaku ekonomi kreatif memegang peran kunci dalam menciptakan nilai tambah, kami berusaha untuk meningkatkan kapasitas mereka. Program pelatihan yang kami tawarkan dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang industri ini, sementara pendampingan individual dirancang untuk membantu mereka menerapkan konsep dan keterampilan yang mereka pelajari dalam konteks pekerjaan mereka. Melalui pendekatan ini, kami tidak hanya berusaha

membangun kapasitas individu, tetapi juga menciptakan iklim kolaboratif yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif secara keseluruhan.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang pemanfaatan aset yang dilakukan selama ini dalam proses *partnertship governance* untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Kami terus melakukan evaluasi periodik terhadap pemanfaatan aset dalam konteks partnership governance. Ini melibatkan pengukuran kinerja, identifikasi peluang baru, dan penyesuaian strategi untuk memastikan bahwa setiap aset yang dimiliki dapat dioptimalkan secara maksimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba.
> (Wawancara, Ri. /20 /12 / 2023)

Dalam wawancara ini, kami menyoroti komitmen kami untuk terus melakukan evaluasi periodik terhadap pemanfaatan aset dalam konteks partnership governance. Pendekatan ini mencakup serangkaian langkah-langkah yang mencakup pengukuran kinerja, identifikasi peluang baru, dan penyesuaian strategi. Melalui langkah-langkah ini, kami berusaha memastikan bahwa setiap aset yang dimiliki dapat dioptimalkan secara maksimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba. Dengan memprioritaskan pengukuran kinerja, kami dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan mengukur dampak keberhasilan inisiatif kami. Sementara itu, identifikasi peluang baru memungkinkan kami untuk terus mengembangkan cara-cara inovatif dalam memanfaatkan aset yang ada, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat setempat. Penyesuaian strategi menjadi elemen krusial, memastikan bahwa kami dapat bersinergi dengan perkembangan terkini dan perubahan dalam lingkungan ekonomi. Dengan demikian, pendekatan

ini bukan hanya tentang pengelolaan aset, tetapi juga tentang mengembangkan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah ini secara berkelanjutan.

4. Pengembangan dan Pemeliharaan

Partnership governance dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba merupakan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai tujuan pengembangan dan pemeliharaan sektor ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Indikator pengembangan melibatkan peningkatan jumlah dan kualitas pelaku usaha kreatif, penguatan infrastruktur pendukung seperti ruang kerja bersama dan fasilitas umum, serta promosi produk kreatif lokal. Sementara itu, pemeliharaan berfokus pada keberlanjutan dan inovasi, termasuk upaya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem kreatif dan memberdayakan masyarakat setempat. Dengan demikian, partnership governance menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif Kabupaten Bulukumba.

Adapun pendapat dari sala satu informan tentang Pengembangan dan Pemeliharaan aset dalam proses *partnertship governance* untuk pengembangan ekonomikreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Dalam konteks Pengembangan dan Pemeliharaan Aset untuk proses partnership governance di Kabupaten Bulukumba, kami fokus pada orientasi strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Hal ini mencakup identifikasi aset kreatif yang dapat diintegrasikan ke dalam partnership governance untuk menciptakan sinergi yang optimal.
> (Wawancara, FZ. /17 /12 / 2023)

Dalam wawancara mengenai Pengembangan dan Pemeliharaan Aset untuk proses partnership governance di Kabupaten Bulukumba, terungkap bahwa fokus utama kami adalah pada orientasi strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Kami meyakini bahwa untuk mencapai sinergi optimal, perlu dilakukan identifikasi menyeluruh terhadap aset-aset kreatif yang dapat diintegrasikan ke dalam kerangka partnership governance. Proses ini tidak hanya melibatkan pengenalan potensi aset kreatif, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana aset-aset tersebut dapat saling melengkapi dan meningkatkan peluang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba. Dengan demikian, upaya ini bukan hanya tentang pengelolaan aset, tetapi juga mengenai membentuk kemitraan yang berkelanjutan untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi kreatif dalam konteks pengembangan wilayah.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang Pengembangan dan Pemeliharaan aset dalam proses *partnertship governance* untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Kami meyakini bahwa Pengembangan dan Pemeliharaan Aset harus mengedepankan inovasi dan kolaborasi dalam konteks partnership governance. Melalui kerjasama yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, kami memastikan aset-aset kreatif dikelola dengan cara yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.
> (Wawancara, SR. /18 /12 / 2023)

Dalam hasil wawancara ini, kami meyakini bahwa Pengembangan dan Pemeliharaan Aset harus melibatkan inovasi dan kolaborasi sebagai pilar utama, terutama dalam konteks partnership governance. Kami percaya bahwa melalui kerjasama yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kami dapat memastikan bahwa aset-aset kreatif dikelola dengan cara yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Kami menganggap bahwa inovasi bukan hanya sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga sebagai kunci untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan dalam pengelolaan aset. Dengan demikian, kami berkomitmen untuk terus mendorong ide-ide baru dan solusi kreatif guna meningkatkan nilai dan dampak positif aset-aset yang kami kelola. Kolaborasi yang erat dengan pemangku kepentingan yang beragam akan menjadi fondasi yang kokoh untuk mencapai visi kami dalam memajukan pengembangan dan pemeliharaan aset dengan pendekatan berkelanjutan dan inovatif.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang Pengembangan dan Pemeliharaan aset dalam proses *partnertship governance* untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Dalam proses partnership governance untuk pengembangan ekonomi kreatif, kami memfokuskan perhatian pada pengelolaan risiko dan keberlanjutan aset. Ini mencakup implementasi kebijakan yang memastikan aset-aset kreatif tidak hanya berkembang, tetapi juga dijaga dengan baik agar memberikan dampak positif jangka panjang.
> (Wawancara, Ri. /20 /12 / 2023)

Dalam wawancara mengenai partnership governance untuk pengembangan ekonomi kreatif, kami menyoroti fokus utama pada pengelolaan risiko dan keberlanjutan aset. Dalam konteks ini, kami sangat menekankan pentingnya implementasi kebijakan yang tidak hanya memastikan pertumbuhan aset kreatif, tetapi juga menjaga keberlanjutannya dengan baik agar mampu memberikan dampak positif jangka panjang. Langkah-langkah konkret dalam manajemen

risiko dan keberlanjutan ini diarahkan untuk melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta mengadopsi praktik terbaik industri. Dengan demikian, kami meyakini bahwa melibatkan aspek-aspek ini dalam strategi partnership governance tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang Pengembangan dan Pemeliharaan aset dalam proses *partnertship governance* untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Salah satu pendekatan yang kami terapkan adalah melibatkan secara aktif komunitas lokal dalam Pengembangan dan Pemeliharaan Aset. Dengan mendorong partisipasi mereka dalam proses partnership governance, kami berupaya menciptakan peluang ekonomi kreatif yang merata dan memberdayakan masyarakat lokal secara berkelanjutan.
> (Wawancara, An. /20 /12 / 2023)

Dalam wawancara ini, kami memahami bahwa salah satu pendekatan yang diimplementasikan oleh perusahaan kami adalah melibatkan secara aktif komunitas lokal dalam Pengembangan dan Pemeliharaan Aset. Kami meyakini bahwa keterlibatan komunitas adalah kunci untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami fokus pada mendorong partisipasi mereka dalam proses partnership governance. Melalui kolaborasi ini, kami berusaha menciptakan peluang ekonomi kreatif yang merata, sehingga masyarakat lokal dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Tujuan utama kami bukan hanya membangun aset, tetapi juga memberdayakan masyarakat setempat untuk

berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan. Kami percaya bahwa dengan pendekatan ini, tidak hanya akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang seimbang, tetapi juga pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang Pengembangan dan Pemeliharaan aset dalam proses *partnertship governance* untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Kami menjadikan evaluasi kinerja dan transparansi sebagai pilar utama dalam Pengembangan dan Pemeliharaan Aset melalui partnership governance di Kabupaten Bulukumba. Dengan melakukan pemantauan secara berkala dan mengkomunikasikan hasilnya secara transparan, kami berusaha untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dalam mencapai tujuan pengembangan ekonomi kreatif.
> (Wawancara, AT. /19 /12 / 2023)

Dalam wawancara ini, kami mendapati bahwa Kabupaten Bulukumba menetapkan evaluasi kinerja dan transparansi sebagai fondasi utama dalam Pengembangan dan Pemeliharaan Aset melalui pendekatan partnership governance. Pendekatan ini melibatkan pemantauan berkala terhadap berbagai inisiatif pembangunan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dalam mencapai tujuan pengembangan ekonomi kreatif. Menurut narasumber, langkah-langkah tersebut mencakup evaluasi reguler terhadap kinerja program dan proyek yang dilakukan, serta komunikasi hasilnya secara terbuka dan transparan kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian, upaya ini diharapkan tidak hanya menciptakan kejelasan mengenai pencapaian tujuan pembangunan, tetapi juga memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat

dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba.

5. Faktor Pendukung

Pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba, khususnya dalam sektor pariwisata, melibatkan suatu proses yang kompleks dan memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat lokal, dan pihak terkait lainnya. Dalam konteks ini, konsep governance partnership menjadi landasan utama untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan pengembangan ekonomi kreatif. Pendukung utama dari proses partnership governance ini adalah sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Pemerintah daerah, sebagai pemangku kebijakan, dapat menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan memfasilitasi kemitraan dengan pelaku bisnis. Di samping itu, sektor swasta, melalui investasi dan inovasi, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan objek pariwisata. Kerjasama ini juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, yang dapat memberikan wawasan budaya, mengembangkan produk lokal, dan mendukung promosi pariwisata secara berkelanjutan. Melalui partnership governance, Kabupaten Bulukumba dapat membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan, meningkatkan daya tarik pariwisata, dan menciptakan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat lokal.Adapun pendapat dari sala satu informan tentang Faktor Pendukung proses *partnertship governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Faktor pendukung utama dalam proses partnership governance untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba adalah

> komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Dukungan aktif dari pemerintah membuka pintu bagi kolaborasi yang efektif antara pihak-pihak terlibat, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi kreatif.
> (Wawancara, SR. /18 /12 / 2023)

Proses partnership governance untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba diwarnai oleh faktor pendukung utama, yakni komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Hasil wawancara dengan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa dukungan aktif yang diberikan oleh pemerintah setempat memainkan peran krusial dalam membuka pintu kolaborasi yang efektif antara pihak-pihak terlibat. Komitmen ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Adanya keseriusan dan kepedulian dari pemerintah daerah memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berinvestasi dan berinovasi. Dengan demikian, keterlibatan aktif pemerintah daerah menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun kemitraan yang berkelanjutan untuk menggerakkan sektor ekonomi kreatif Kabupaten Bulukumba ke arah yang lebih maju.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang Faktor Pendukung proses *partnertship governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Partisipasi aktif masyarakat lokal menjadi faktor penting dalam governance partnership. Dengan melibatkan pemangku kepentingan setempat, termasuk pelaku ekonomi kreatif, proses pengembangan lebih responsif terhadap kebutuhan dan potensi lokal. Keterlibatan ini juga memperkuat rasa kepemilikan bersama terhadap proyek-proyek ekonomi kreatif.
> (Wawancara, AA. /18 /12 / 2023)

Dalam wawancara ini, terungkap bahwa partisipasi aktif masyarakat lokal memiliki peran krusial dalam mencapai governance partnership yang efektif.

Melibatkan pemangku kepentingan setempat, termasuk pelaku ekonomi kreatif, diakui sebagai faktor penting dalam menjadikan proses pengembangan lebih responsif terhadap kebutuhan dan potensi lokal. Hasilnya, proyek-proyek ekonomi kreatif yang dijalankan dalam kerangka ini dapat lebih berhasil merespons dinamika lokal. Keterlibatan aktif ini juga membawa dampak positif dalam memperkuat rasa kepemilikan bersama terhadap proyek-proyek tersebut. Dengan demikian, terjalinlah hubungan sinergis antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku ekonomi kreatif, menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang Faktor Pendukung proses *partnertship governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Fasilitas dan infrastruktur yang memadai menjadi pendorong penting dalam partnership governance. Ketersediaan ruang kerja, aksesibilitas transportasi, dan teknologi informasi yang canggih dapat meningkatkan daya saing ekonomi kreatif serta mempercepat proses kerja sama antarmitra.
> (Wawancara, Ri. /20 /12 / 2023)

Dalam wawancara ini, terungkap bahwa fasilitas dan infrastruktur yang memadai memiliki peran kunci dalam mendorong partnership governance. Peserta wawancara menyoroti bahwa ketersediaan ruang kerja yang memadai bukan hanya sekadar kenyamanan, tetapi juga menjadi landasan fundamental bagi kolaborasi yang efektif. Aksesibilitas transportasi juga diakui sebagai faktor penting, karena dapat memfasilitasi pertemuan dan interaksi antarmitra dengan lebih lancar. Selain itu, teknologi informasi yang canggih diidentifikasi sebagai elemen kritis yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi kreatif dan

mempercepat proses kerja sama. Integrasi teknologi informasi secara efisien dianggap sebagai pendorong utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan memudahkan pertukaran informasi antar mitra. Oleh karena itu, pihak yang terlibat dalam partnership governance diharapkan dapat memprioritaskan investasi dalam fasilitas, transportasi, dan teknologi informasi untuk mencapai sinergi yang optimal dalam kerja sama mereka.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang Faktor Pendukung proses *partnertship governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Adanya program pendidikan dan pelatihan yang terfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan dalam sektor ekonomi kreatif dapat meningkatkan daya saing dan inovasi. Pendidikan yang mendalam akan menciptakan sumber daya manusia yang handal dan mampu bersaing dalam pasar ekonomi kreatif.
> (Wawancara, AT. /19 /12 / 2023)

Dalam wawancara tersebut, terungkap bahwa keberadaan program pendidikan dan pelatihan yang difokuskan pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan di sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing dan inovasi. Responden menekankan bahwa pendidikan yang mendalam dalam bidang ini tidak hanya menciptakan individu yang terampil, tetapi juga mencanangkan penciptaan sumber daya manusia yang handal. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan bahwa lulusan akan mampu bersaing secara efektif dalam pasar ekonomi kreatif yang semakin kompetitif. Kesimpulannya, upaya terus-menerus dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan di sektor ini dianggap krusial untuk memastikan adanya tenaga kerja yang mampu menghadapi tantangan dan merespons dinamika ekonomi kreatif

dengan inovasi yang berkelanjutan.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang Faktor Pendukung proses *partnertship governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Keberhasilan partnership governance juga sangat tergantung pada kerangka hukum dan kebijakan dukungan dari pemerintah. Pembentukan regulasi yang jelas dan mendukung, seperti insentif pajak atau perlindungan hukum, dapat memberikan kepastian kepada para pemangku kepentingan dan mendorong investasi serta pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba.
> (Wawancara, An. /20 /12 / 2023)

Dalam wawancara kami dengan pemangku kepentingan terkait, terungkap bahwa keberhasilan partnership governance di Kabupaten Bulukumba sangat bergantung pada dukungan dari kerangka hukum dan kebijakan pemerintah. Para responden menekankan bahwa pembentukan regulasi yang jelas dan mendukung merupakan kunci utama dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Insentif pajak dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dianggap sebagai langkah-langkah positif yang dapat memberikan kepastian kepada para pelaku industri kreatif. Para pemangku kepentingan juga menyoroti bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menciptakan kepastian, tetapi juga menjadi pendorong investasi di sektor ekonomi kreatif. Dengan adanya regulasi yang mendukung, Kabupaten Bulukumba diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan di masa depan.

6. Faktor penghambat

Dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba, terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi proses partnership governance,

khususnya dalam sektor pariwisata. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat setempat. Keterbatasan sumber daya dan pemahaman yang kurang mendalam tentang manfaat kerja sama antarstakeholder juga menjadi faktor penghambat. Selain itu, aspek regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan ekonomi kreatif, khususnya di sektor pariwisata, turut menjadi penghambat. Ketidakpastian mengenai peraturan dan perizinan dapat menghambat investasi dan pertumbuhan industri kreatif di Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran, komunikasi, dan koordinasi antarberbagai pihak terkait agar proses partnership governance dapat berjalan lebih efisien dan mendukung pengembangan ekonomi kreatif, khususnya di sektor pariwisata, di Kabupaten Bulukumba.Adapun pendapat dari sala satu informan tentang Faktor penghambat proses *partnertship governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Faktor penghambat dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba adalah keterbatasan sumber daya finansial. Terbatasnya anggaran dapat menjadi hambatan serius dalam mendukung keberlanjutan partnership governance untuk proyek ekonomi kreatif.
> (Wawancara, FZ. /17 /12 / 2023)

Dalam wawancara yang dilakukan terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba, ternyata teridentifikasi bahwa faktor penghambat utamanya adalah keterbatasan sumber daya finansial. Para pemangku kepentingan menyoroti bahwa terbatasnya anggaran menjadi kendala serius dalam

mendorong keberlanjutan partnership governance untuk proyek ekonomi kreatif di daerah tersebut. Ketidakcukupan dana membatasi kemampuan pemerintah setempat untuk memberikan dukungan yang optimal, menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan, dan berpotensi menghambat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Upaya untuk mengatasi kendala ini memerlukan strategi inovatif, termasuk eksplorasi sumber daya finansial alternatif dan memperkuat kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat lokal agar ekosistem ekonomi kreatif dapat berkembang secara berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang Faktor penghambat proses *partnertship governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Salah satu tantangan utama dalam proses partnership governance di Kabupaten Bulukumba adalah kurangnya kesadaran dari berbagai stakeholder terkait. Kurangnya pemahaman mengenai manfaat dan potensi ekonomi kreatif dapat memperlambat dukungan dan partisipasi aktif dari pihak-pihak terkait.
> (Wawancara, AA. /18 /12 / 2023)

Dalam wawancara terkait proses partnership governance di Kabupaten Bulukumba, tampaknya salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dari berbagai pihak terkait. Stakeholder-stakeholder yang terlibat dalam governance tampak belum sepenuhnya menyadari pentingnya kerjasama ini. Seiring dengan hal itu, terlihat juga bahwa kurangnya pemahaman mengenai manfaat dan potensi ekonomi kreatif menjadi penghambat dalam mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari pihak-pihak terkait. Kondisi ini dapat memperlambat kemajuan dan keberlanjutan dari inisiatif partnership governance di Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu, upaya untuk

meningkatkan kesadaran dan pemahaman stakeholders terhadap manfaat ekonomi kreatif perlu diintensifkan agar dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk terwujudnya kemitraan yang efektif dan berkelanjutan di tingkat lokal tersebut.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang Faktor penghambat proses *partnertship governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Tingginya tingkat birokrasi di Kabupaten Bulukumba dapat menjadi faktor penghambat dalam proses partnership governance. Proses yang panjang dan rumit untuk mendapatkan izin atau persetujuan bisa menghambat kecepatan implementasi proyek ekonomi kreatif.
> (Wawancara, SR. /18 /12 / 2023)

Wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan di Kabupaten Bulukumba mengungkapkan bahwa tingginya tingkat birokrasi di wilayah tersebut dapat menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi partnership governance. Responden menyoroti proses panjang dan rumit yang diperlukan untuk mendapatkan izin atau persetujuan terkait proyek ekonomi kreatif. Meskipun kebijakan partnership governance telah diperkenalkan untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, namun tingkat birokrasi yang tinggi masih menjadi kendala signifikan. Para pemangku kepentingan merasa bahwa proses yang rumit ini dapat menghambat kecepatan implementasi proyek dan mengurangi fleksibilitas dalam menjalankan inisiatif ekonomi kreatif. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi dalam proses perizinan dan persetujuan dianggap sangat penting untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Bulukumba dalam mendukung pertumbuhan

sektor ekonomi kreatif melalui pendekatan partnership governance.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang Faktor penghambat proses *partnertship governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Kurangnya infrastruktur pendukung, seperti akses internet yang cepat atau fasilitas penunjang industri kreatif, dapat menjadi penghambat utama dalam pengembangan ekonomi kreatif di daerah tersebut. Infrastruktur yang kurang memadai dapat membatasi pertumbuhan sektor ini.
> (Wawancara, An. /20 /12 / 2023)

Dalam wawancara yang dilakukan, terungkap bahwa kurangnya infrastruktur pendukung, seperti akses internet yang cepat atau fasilitas penunjang industri kreatif, dapat menjadi penghambat utama dalam pengembangan ekonomi kreatif di daerah tersebut. Responden menyoroti bahwa sektor ekonomi kreatif sangat tergantung pada fasilitas modern, terutama akses internet yang handal, sebagai fondasi utama dalam mendukung proses kreatif dan kolaborasi. Keterbatasan infrastruktur yang terlihat jelas dapat membatasi kemungkinan pertumbuhan sektor ini, mengingat ketergantungan pada teknologi dan konektivitas. Oleh karena itu, pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembenahan infrastruktur pendukung guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif di wilayah tersebut.

Pendapat yang serupa juga di unkapkan sala satu informan tentang Faktor penghambat proses *partnertship governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa :

> Faktor eksternal seperti ketidakstabilan kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi proses partnership governance di Kabupaten Bulukumba. Fluktuasi ekonomi global dapat berdampak negatif pada investasi dan kerjasama lintas batas yang dapat menghambat

perkembangan ekonomi kreatif di tingkat lokal.
(Wawancara, Ri. /20 /12 / 2023)

Dalam wawancara ini, kami mendiskusikan dampak faktor eksternal terhadap proses partnership governance di Kabupaten Bulukumba. Menurut narasumber, salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan adalah ketidakstabilan kondisi ekonomi global. Narasumber menyatakan bahwa fluktuasi ekonomi global dapat memberikan dampak signifikan pada investasi dan kerjasama lintas batas di wilayah tersebut. Hal ini, pada gilirannya, dapat menghambat perkembangan ekonomi kreatif di tingkat lokal. Ketidakpastian ekonomi global cenderung menciptakan ketidakpastian dalam keputusan investasi dan proyek kerjasama, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu, dalam mengelola partnership governance, pihak terkait diharapkan mampu mengantisipasi dan merespons dinamika ekonomi global dengan strategi yang fleksibel, sehingga dapat memitigasi dampak negatifnya dan mendukung perkembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

C. Pembahasan

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Dari hasil penelitian yang di dapatkan megenai tentang *Partnertship Governance* Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Bulukumba dengan inidikator Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran menunjukan telah berjalan dengan baik

Hasil pembaahasan dari wawancara mengenai Partnership Governance dalam konteks Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa proses ini

mendasarkan diri pada prinsip keterlibatan komprehensif dan inklusif. Salah satu informan menyatakan bahwa kolaborasi erat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat adalah kunci utama dalam memastikan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait. Proses ini dirancang untuk mendorong kerja sama intensif dan menggarisbawahi pentingnya partisipasi serta kontribusi dari setiap entitas yang terlibat.

Poin kunci yang dapat dipembaahasankan dari pernyataan informan melibatkan kolaborasi intensif, keterlibatan aktif, efektivitas dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, dan alokasi anggaran yang efektif. Kolaborasi intensif merujuk pada upaya meningkatkan kerja sama erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Keterlibatan aktif mencerminkan penekanan pada peran yang signifikan dari setiap pihak dalam proses perencanaan dan penganggaran, termasuk partisipasi dalam diskusi, pengambilan keputusan, dan implementasi proyek.

Efektivitas dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif menjadi fokus utama, menunjukkan bahwa proses ini tidak hanya mengejar perencanaan dan penganggaran sebagai tujuan akhir, tetapi juga mengedepankan efektivitas kebijakan dan tindakan yang mendukung pertumbuhan sektor tersebut. Alokasi anggaran yang efektif menjadi penekanan, menandakan bahwa setiap pengeluaran diarahkan secara cermat untuk memastikan dampak maksimal terhadap perkembangan ekonomi kreatif.

Wawancara dengan informan lain menyoroti pendekatan inklusif sebagai landasan utama Partnership Governance. Dalam konteks Kabupaten Bulukumba,

pendekatan ini mencakup keterlibatan pelaku industri kreatif, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Tujuan utama dari melibatkan kelompok-kelompok ini adalah untuk memastikan bahwa rencana dan anggaran yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata dalam pengembangan ekonomi kreatif. Inklusivitas dianggap bukan hanya sebagai strategi efektif, melainkan juga sebagai langkah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam merencanakan dan menganggarkan sumber daya untuk memajukan sektor ekonomi kreatif.

Dalam konteks pembangunan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba, partnership governance muncul sebagai kunci utama dalam perancangan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta membawa dampak positif dalam mengidentifikasi peluang dan risiko di sektor ekonomi kreatif. Dialog terbuka dan berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif menjadi landasan bagi pengambilan keputusan yang terinformasi dan responsif terhadap dinamika pasar serta perkembangan industri kreatif. Partnership governance tidak hanya menjadi strategi pelaksanaan tetapi juga menjadi landasan kuat bagi pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Dalam wawancara lainnya, terungkap bahwa proses partnership governance di Kabupaten Bulukumba didasarkan pada prinsip keterlibatan komprehensif melalui dialog terbuka dan berkelanjutan antara pemerintah, pelaku industri, dan komunitas lokal. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk menggandeng berbagai pemangku kepentingan dalam sebuah kolaborasi efektif dan inklusif. Proses perencanaan dan penganggaran melibatkan kontribusi dan pandangan

berharga dari para pelaku industri dan komunitas lokal, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Harapannya, hasilnya dapat memberikan dampak positif yang lebih luas dan berkelanjutan bagi perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba.

Dalam keseluruhan pembaahasan, partnership governance terbukti menjadi pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak yang relevan dalam upaya merencanakan dan mengalokasikan anggaran secara efektif guna mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba. Pendekatan ini tidak hanya mencakup aspek perencanaan dan penganggaran, tetapi juga menekankan pentingnya kolaborasi intensif, keterlibatan aktif, efektivitas dalam mendukung pertumbuhan, alokasi anggaran yang efektif, serta inklusivitas sebagai landasan strategis.

2. Penggunaan

Dari hasil penelitian yang di dapatkan megenai tentang Partnertship Governance Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Bulukumba dengan inidikator Penggunaan menunjukan telah berjalan dengan baik

Hasil intervensi wawancara mengenai proses partnership governance untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba mengungkapkan bahwa penggunaan aset menjadi elemen kunci dalam strategi tersebut. Fokus utama terletak pada optimalisasi aset yang telah ada, seperti lahan, fasilitas, dan sumber daya lainnya, dengan tujuan utama menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Melalui sinergi antara pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah, pelaku industri kreatif, dan

masyarakat, diharapkan dapat terbentuk kemitraan yang kuat untuk merencanakan dan melaksanakan inisiatif pengembangan ekonomi kreatif.

Dalam implementasinya, ditemukan bahwa Kabupaten Bulukumba mengambil langkah-langkah konkret untuk mengidentifikasi potensi aset secara menyeluruh, baik fisik maupun non-fisik, serta merancang strategi penggunaannya. Pendekatan partnership governance diarahkan pada mencapai sinergi optimal antara pemerintah daerah, pelaku bisnis, dan masyarakat lokal. Dengan memanfaatkan aset-aset secara efisien, mereka berharap Kabupaten Bulukumba dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

Pentingnya peran aset sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif ditekankan dalam wawancara ini. Pendekatan ini melibatkan pemetaan aset secara menyeluruh, baik fisik maupun non-fisik, sebagai dasar untuk mengintegrasikan aset-aset tersebut ke dalam kebijakan kolaboratif. Dengan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif setempat melalui identifikasi, pengelompokan, dan pemanfaatan aset, Kabupaten Bulukumba berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.

Pendekatan inovatif di Kabupaten Bulukumba menekankan penggunaan aset sebagai pilar utama dalam praktek partnership governance untuk pengembangan ekonomi kreatif. Aset tidak hanya terbatas pada infrastruktur, tetapi juga mencakup keahlian lokal dan kekayaan budaya. Melalui penggabungan infrastruktur, keahlian masyarakat lokal, dan kekayaan budaya, mereka berupaya

merangsang pertumbuhan sektor ekonomi kreatif secara holistik, menciptakan ekosistem yang mendukung kreativitas dan inovasi.

Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba menunjukkan komitmen serius untuk mengoptimalkan peran aset sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi kreatif melalui partnership governance. Kolaborasi erat antara pemerintah daerah, pelaku ekonomi kreatif, dan pemangku kepentingan lainnya dilibatkan dalam identifikasi, penilaian, dan pemanfaatan aset-aset yang ada. Dengan fokus pada pemanfaatan efisien aset, diharapkan Kabupaten Bulukumba dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam merancang strategi pengembangan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan daya saing ekonomi tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan berkelanjutan.

3. Pemanfaatan

`Dari hasil penelitian yang di dapatkan megenai tentang Partnertship Governance Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Bulukumba dengan inidikator Pemanfaatan menunjukan telah berjalan dengan baik

Hasil pembaahasan dari wawancara menunjukkan bahwa Kabupaten Bulukumba telah berhasil mengoptimalkan pemanfaatan aset melalui langkah-langkah konkret, seperti inventarisasi dan pemetaan aset kreatif. Dengan mengakses data yang akurat dan terkini, kami dapat mengidentifikasi potensi aset strategis yang dapat diintegrasikan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Pendekatan yang diusulkan melibatkan strategi partnership governance, di mana kolaborasi antara pemangku kepentingan dapat ditingkatkan, termasuk komunitas

lokal, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Harapannya, integrasi aset yang teridentifikasi akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam konteks inisiatif partnership governance, implementasi strategi kolaboratif dilakukan melalui kemitraan strategis dengan pelaku ekonomi kreatif lokal dan melibatkan berbagai sektor industri. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan lingkungan sinergis yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Melibatkan pemangku kepentingan dan lembaga terkait dalam pengambilan keputusan adalah bagian integral dari upaya ini, dengan tujuan memastikan partisipasi semua pihak dalam proses pengembangan ekonomi kreatif. Dengan pendekatan ini, diharapkan sinergi yang efektif dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif di komunitas lokal.

Dalam konteks pengelolaan aset yang terkoordinasi, terbentuklah platform terbuka bagi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba. Pendekatan ini melibatkan penyediaan ruang kolaboratif, sumber daya bersama, dan fasilitas pendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan yang merangsang inovasi dan kolaborasi, dengan harapan dapat meningkatkan daya saing dan kontribusi sektor ini terhadap pembangunan lokal. Platform tersebut menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara berbagai entitas dalam ekosistem ekonomi kreatif, sekaligus memberikan akses yang lebih mudah dan terstruktur terhadap sumber daya yang diperlukan.

Dalam upaya menerapkan partnership governance, penekanan diberikan pada

pengembangan program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif. Pemanfaatan aset berupa pengetahuan dan keterampilan dianggap sebagai kontribusi nyata terhadap pertumbuhan sektor ini. Program pelatihan dan pendampingan dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang industri ini dan membantu penerapan konsep dan keterampilan dalam konteks pekerjaan mereka. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan membangun kapasitas individu, tetapi juga menciptakan iklim kolaboratif yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif secara keseluruhan.

Dalam konteks evaluasi periodik, terungkap bahwa Kabupaten Bulukumba berkomitmen untuk terus mengukur kinerja pemanfaatan aset dalam kerangka partnership governance. Pendekatan ini mencakup pengukuran kinerja, identifikasi peluang baru, dan penyesuaian strategi. Melalui langkah-langkah ini, upaya dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aset dioptimalkan secara maksimal. Pengukuran kinerja memungkinkan identifikasi area-area perbaikan, sementara identifikasi peluang baru membuka ruang untuk inovasi dalam memanfaatkan aset yang ada. Penyesuaian strategi menjadi elemen penting untuk bersinergi dengan perkembangan terkini dan perubahan dalam lingkungan ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya tentang pengelolaan aset, tetapi juga tentang mengembangkan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif secara berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bulukumba.

4. Pengembangan dan Pemeliharaan

Dari hasil penelitian yang di dapatkan megenai tentang *Partnertship* Governance Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Bulukumba

dengan inidikator Pengembagan dan pemeliharaan menunjukan telah berjalan

Hasil pembaahasan dari wawancara mengenai Pengembangan dan Pemeliharaan Aset untuk proses partnership governance di Kabupaten Bulukumba menyoroti beberapa aspek kunci. Fokus utama dari penelitian ini adalah orientasi strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Ditemukan bahwa identifikasi menyeluruh terhadap aset-aset kreatif menjadi langkah krusial dalam mengintegrasikan mereka ke dalam kerangka partnership governance. Proses ini tidak hanya terbatas pada pengenalan potensi aset kreatif, tetapi juga melibatkan pertimbangan bagaimana aset-aset tersebut dapat saling melengkapi dan meningkatkan peluang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba.

Dalam hasil wawancara, ditekankan bahwa Pengembangan dan Pemeliharaan Aset harus melibatkan inovasi dan kolaborasi sebagai pilar utama, terutama dalam konteks partnership governance. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dianggap sebagai kunci untuk memastikan bahwa aset-aset kreatif dikelola dengan cara yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Inovasi dianggap bukan hanya sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga sebagai kunci untuk menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan aset.

Dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif, hasil wawancara menyoroti pentingnya pengelolaan risiko dan keberlanjutan aset. Implementasi kebijakan yang memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan aset kreatif diidentifikasi sebagai langkah-langkah konkret. Melibatkan pemangku kepentingan yang

relevan, memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan, dan mengadopsi praktik terbaik industri dianggap sebagai elemen kunci dalam manajemen risiko dan keberlanjutan.

Sebagai pendekatan praktis, wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas lokal menjadi salah satu strategi implementasi. Keterlibatan ini dianggap kunci untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan, dengan fokus pada menciptakan peluang ekonomi kreatif yang merata bagi masyarakat lokal. Perusahaan berkomitmen untuk tidak hanya membangun aset, tetapi juga memberdayakan masyarakat setempat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan.

Terakhir, Kabupaten Bulukumba menetapkan evaluasi kinerja dan transparansi sebagai fondasi utama dalam Pengembangan dan Pemeliharaan Aset melalui partnership governance. Pendekatan ini mencakup pemantauan berkala terhadap inisiatif pembangunan, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas. Evaluasi reguler terhadap kinerja program dan proyek diharapkan tidak hanya menciptakan kejelasan mengenai pencapaian tujuan pembangunan, tetapi juga memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba.

5. Faktor Pendukung

Penelitian ini mengungkap bahwa proses partnership governance untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba dipengaruhi secara signifikan oleh komitmen kuat dari pemerintah daerah. Dukungan aktif yang

diberikan oleh pemerintah setempat menjadi kunci dalam membuka pintu kolaborasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan. Komitmen ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah tersebut, memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berinvestasi dan berinovasi. Keterlibatan aktif pemerintah daerah menjadi fondasi kokoh dalam membangun kemitraan yang berkelanjutan, mendorong sektor ekonomi kreatif Kabupaten Bulukumba ke arah yang lebih maju.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat lokal juga memiliki peran krusial dalam mencapai governance partnership yang efektif. Melibatkan pemangku kepentingan setempat, termasuk pelaku ekonomi kreatif, diakui sebagai faktor penting dalam menjadikan proses pengembangan lebih responsif terhadap kebutuhan dan potensi lokal. Keterlibatan aktif ini tidak hanya merespons dinamika lokal tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan bersama terhadap proyek-proyek ekonomi kreatif, menciptakan hubungan sinergis antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku ekonomi kreatif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Fasilitas dan infrastruktur yang memadai juga terbukti sebagai elemen kunci dalam mendorong partnership governance. Ruang kerja yang memadai, aksesibilitas transportasi, dan integrasi teknologi informasi diidentifikasi sebagai faktor-faktor penting yang mendukung kolaborasi efektif. Oleh karena itu, investasi dalam fasilitas, transportasi, dan teknologi informasi diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan memudahkan pertukaran informasi antar mitra, mencapai sinergi optimal dalam kerja sama.

Selanjutnya, keberadaan program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan di sektor ekonomi kreatif diakui memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing dan inovasi. Pendidikan yang mendalam di bidang ini diharapkan menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan handal, mampu bersaing efektif dalam pasar ekonomi kreatif yang kompetitif.

Terakhir, wawancara dengan pemangku kepentingan menyoroti bahwa keberhasilan partnership governance di Kabupaten Bulukumba sangat bergantung pada dukungan dari kerangka hukum dan kebijakan pemerintah. Pembentukan regulasi yang jelas dan mendukung, insentif pajak, dan perlindungan hukum dianggap sebagai langkah-langkah positif yang memberikan kepastian dan menjadi pendorong investasi di sektor ekonomi kreatif. Dengan adanya regulasi yang mendukung, Kabupaten Bulukumba diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan

6. Faktor penghambat

Hasil pembaahasan dari wawancara mengenai pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, keterbatasan sumber daya finansial menjadi faktor penghambat utama, dengan anggaran yang terbatas menjadi kendala serius dalam mendorong keberlanjutan partnership governance. Keterbatasan dana membatasi kemampuan pemerintah setempat untuk memberikan dukungan optimal, menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan, dan berpotensi menghambat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Dalam mengatasi kendala ini, diperlukan strategi inovatif, termasuk

eksplorasi sumber daya finansial alternatif dan penguatan kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat lokal.

dalam konteks partnership governance, kurangnya kesadaran dari berbagai pihak terkait menjadi tantangan utama. Stakeholder-stakeholder yang terlibat tampak belum sepenuhnya menyadari pentingnya kerjasama ini, dan kurangnya pemahaman mengenai manfaat dan potensi ekonomi kreatif menghambat dukungan dan partisipasi aktif. Upaya perlu diintensifkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman stakeholders agar menciptakan lingkungan yang mendukung kemitraan yang efektif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

tingginya tingkat birokrasi di Kabupaten Bulukumba menjadi faktor penghambat dalam implementasi partnership governance. Proses panjang dan rumit dalam mendapatkan izin atau persetujuan terkait proyek ekonomi kreatif dianggap menghambat kecepatan implementasi proyek dan mengurangi fleksibilitas dalam menjalankan inisiatif ekonomi kreatif. Peningkatan efisiensi dalam proses perizinan dan persetujuan dianggap sangat penting untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Bulukumba dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.

kurangnya infrastruktur pendukung, seperti akses internet yang cepat, menjadi penghambat utama dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sumber daya ini dianggap krusial bagi sektor ekonomi kreatif yang sangat bergantung pada teknologi dan konektivitas. Pembenahan infrastruktur pendukung diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba.

dalam konteks faktor eksternal, ketidakstabilan kondisi ekonomi global diidentifikasi sebagai dampak signifikan pada proses partnership governance. Fluktuasi ekonomi global dapat mempengaruhi investasi dan kerjasama lintas batas di wilayah tersebut, dengan potensi menghambat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif secara lokal. Manajemen partnership governance perlu mampu mengantisipasi dan merespons dinamika ekonomi global dengan strategi fleksibel guna mendukung perkembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Aktor- Aktor Partnership Governance

Aktor- Aktor Partnership Governance	Peranan Aktor- Aktor Partnership Governance
Dinas Disparporav	Perencanaan:Pemerintah Bertanggung jawab untuk merumuskan rencana strategis dan pengembangan destinasi pariwisata pesisir. -Pengaturan dan regulasi: Pemerintah memiliki peran dalam mengembangkan kebijakan, peraturan, dan standar yang mengatur pengembangan dan operasional destinasi pariwisata pesisir. -Pengawasan: Pemerintah bertugas untuk mengawasi dan memantau aktivitas di destinasi pariwisata pesisir. Koordinasi antarinstansi: Pemerintah harus memastikan adanya koordinasi yang baik antara berbagai instansi dan lembaga terkait dalam pengembangan destinasi pariwisata pesisir
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Keberadaan sektor

	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bukan hanya dianggap sebagai tempat penampungan sementara bagi para pekerja yang belum masuk ke sektor formal, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang demikian besar. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis ekonomi, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM.
Bank Sulselbar	PT. Bank Sul-Selbar yang merupakan Bank milik Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang memiliki kelebihan tersendiri karena selain Badan Usaha Milik Daerah yang harus mendukung program Pemerintah Daerah, juga sekaligus berfungsi sebagai alat otonomi daerah dalam membantu pertumbuhan perekonomian daerah. Selain itu, sebagai Bank Umum, Bank Sul-Selbar juga melaksanakan usaha jasa perbankan yang sehat dan dituntut harus dapat bersaing dengan bank- bank umum lainnya. nk Sul-selbar selaku Bank Milik Pemerintah daerah yang salah satu tugas pokoknya adalah meningkatkan perekonomian di daerah dengan komitmen pengembangan usaha mikro,

	kecil dan menengah. Misi yang dijalankan Bank Sul-selbar sangat kental sebagai Bank Pembangunan Daerah yang dapat memberikan dukungan terhadap pembangunan daerah dan mendukung pembinaan usaha.[1] Dalam hal berusaha untuk meningkatkan usaha atau guna sesuatu barang,diperlukan bantuan dalam bentuk permodalan, bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang di sebut dengan kredit.Kredit juga merupakan barometer, suatu pengukuran apakah seseorang yang memiliki usaha sukses atau tidak. Makin besar kredit diberikan makin besar pula usahanya dan makin besar kepercayaan orang dan makin berkembanglahusahanya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari peneliti terkait dengan hasil penelitian yang di bahas sebelumnya di antaranya :

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Partnership Governance dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bulukumba, khususnya pada aspek Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, dapat disimpulkan bahwa proses tersebut telah berjalan dengan baik. Kolaborasi erat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama.

2. Penggunaan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Partnertship Governance dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba telah berjalan dengan baik. Melalui pendekatan inovatif, mereka mengintegrasikan infrastruktur, keahlian lokal, dan kekayaan budaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi kreatif secara holistik.

3. Pemanfaatan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Partnership Governance dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bulukumba, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aset telah berjalan efektif melalui langkah-langkah konkret seperti inventarisasi dan pemetaan aset kreatif.

4. Pengembangan dan Pemeliharaan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Partnership Governance dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bulukumba, dapat disimpulkan bahwa proses Pengembangan dan Pemeliharaan Aset

5. Faktor Pendukung

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan partnership governance dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba sangat dipengaruhi oleh komitmen kuat pemerintah daerah.

6. Faktor penghambat

Hasil penelitian pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya finansial, kurangnya kesadaran stakeholders, tingginya birokrasi, dan infrastruktur yang kurang mendukung menjadi hambatan utama.

Aspek indeks partnership governance yaitu dapat disimpulkam bahwa sebagai sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang baik dan stabil pada intinya mengharapkan adanya kolaborasi dari unsur pemerintah, masyarakat, dan swasta dimana dalam mendukung hal tersebut maka diperlukan visi institusi pemerintahan yang jelas dan bekerja secara efisien dan efektif, transparan dalam pengambilan keputusan, akuntabel dari berbagai tindakan stakeholders.

B. Saran

Adapun beberapa saran dari peneliti untuk beberapa pihak sebagai berikut :

1. Bagi dinas Disparpora

   a. Memperbaiki infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, terutama dalam hal akses internet yang cepat dan terjangkau.

   b. Mendorong kerjasama dengan penyedia layanan internet dan teknologi untuk meningkatkan konektivitas di daerah tersebut.

2. Bagi Peneliti selanjutya

Disarankan kepada peneliti selanjutya agar dapar megedentifikasi hambatan dan tantangan yang mungkin timbul selama implementasi perubahan birokrasi dan saran-saran untuk mencari tau lebih dalam lagi agar bisa dijadikan solusi untuk kedepanya tersebut.

LAMPIRAN

Universitas Muhammadiyah Makassar
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences
Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email :fisip@unismuh.ac.id
Official Web : https://fisip.unismuh.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 2789/FSP/A.1-VIII/XI/1445 H/2023 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
H a l : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Andi Ariel Setiadi
S t a m b u k : 10564 11075 20
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba
Judul Skripsi : ***"Partnertship Governance dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bulukumba"***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu. Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 28 November 2023
Ketua Jurusan IP

Ahmad Harakan, S.IP,M.H.I
NBM : 1207 163

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

9 Rabiul Akhir 1445
28 Nopember 2023 M

Nomor : 2881/05/C.4-VIII/XI/1445/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di –
Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2789/FSP/A.1-VIII/XI/1445/2023 tanggal 28 Nopember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ANDI ARIEL SETIADI**
No. Stambuk : **10564 1107520**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PARTNERTSHIP GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN BULUKUMBA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 30 Nopember 2023 s/d 30 Januari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761

11-23

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **30290/S.01/PTSP/2023**
Lampiran : -
Perihal : **Izin penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Bulukumba

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 28817/05/C.4-VIII/XI/1445/2023 tanggal 283 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	:	**A.ARIEL SETIADI**
Nomor Pokok	:	105641107520
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa (S1)
Alamat	:	Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

dmptsp
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PARTNERTSHIP GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN EKONOMIKREATIF DI KABUPATEN BULUKUMBA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ***28 November 2023 s/d 28 Januari 2024***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 28 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
(D P M P T S P T K)
Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Fax. (0413) 85060 Bulukumba 92511

SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 635/DPMPTSPTK/IP/XII/2023

Berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis dari KESBANGPOL dengan Nomor 074/1037/Bakesbangpol/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023, Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap	:	**A.Ariel Setiadi**
Nomor Pokok	:	**105641107520**
Program Studi	:	**Ilmu pemerintahan**
Jenjang	:	**S1**
Institusi	:	**Unismuh Makassar**
Tempat/Tanggal Lahir	:	**Kajang / 2002-10-07**
Alamat	:	**Bonto Punre**
Jenis Penelitian	:	**Kualitatif**
Judul Penelitian	:	**Partnership Governance Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Bulukumba**
Lokasi Penelitian	:	**Bulukumba**
Pendamping	:	**Ahmad Harakan S.IP, M.Si**
Instansi Penelitian	:	**Kantor Dinas Disparpora**
Lama Penelitian	:	**tanggal 28 November 2023 s/d 28 Januari 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bulukumba;
4. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Dikeluarkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 20 Desember 2023

Kepala Dinas DPMPTSPTK

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 31 (0413) 83700 Fax. (0413) 83700
E-mail : disbudparbulukumba@gmail.com, website: www. Bulukumbatourism.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor: 070 / 871/Disparpora.4/XII/2023

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor: 635/DPMPTSPTK/IP/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023, Perihal Izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a	: **A.Ariel Setiadi**
No. Pokok	: 105641107520
Prog. Studi	: Ilmu Pemerintahan
Institusi	: Universitas Muhammadyah Makassar
Alamat	: Bonto Punre, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data mulai tanggal 28 November sampai dengan 27 Desember 2023 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba, dengan judul skripsi **"Partnership Governance Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bulukumba"** sebagai syarat penyelesaian studi Strata Satu (1) pada program studi ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadyah Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 27 Desember 2023
Kepala Dinas

Ferryawan Z Fahmi, S.STP., M.AP
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19820212 200212 1 001

Nama- nama Informan

No	Nama	Jabatan	Inisial
1	Ferryawan Z Fahmi, S.STP.,M.AP	Kepala dinas parawisata	FZ
2	A. Aryono, S. IP., MM	bidang pemasaran, pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif	AA
3	Syamsul rijal, S.Pd	bidang pemasaran, pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif	SR
4	Andi Tenri sanna, ST	bidang pemasaran, pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif	AT
5	Alimuddin	Masyarakat setempat	An
6	Rosdianawati	pengunjung tempat wisata	Ri

Dokumentasi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Wawancara dengan bapak A. Aryono, S. IP., MM (bidang pemasaran, pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif)

Wawancara dengan Bapak Alimuddin salah satu warga setempat

Wawancara dengan Ibu Rosdianawati salah satu pengunjung

Draf wawancara

1 Bagaimana proses *partnertship governance* dalam Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba

2 Bagaimana Penggunaan aset yang di manfaatkan dalam proses *partnertship governance* untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba

3 bagaimana pemanfaatan aset yang dilakukan selama ini dalam proses *partnertship governance* untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba

4 bagaimana Pengembangan dan Pemeliharaan aset dalam proses *partnertship governance* untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba

5 apa saja menajdi Faktor Pendukung proses *partnertship governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba?

6 apa saja menajdi Faktor penghambat proses *partnertship governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bulukumba?

DAFTAR PUSTAKA

Aysa, I. R. (2020). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Digital. *JurnalAt-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, *2*(2), 121-138.

Asean. (2016). "regional comprehensive economic partnership."Http://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic- partnership

Arjana, I., dan Bagus, G. 2015. Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jakarta:Rajawali Pers.

Anggraini, S. (2017). Public Private Partnership Dalam Pengembangan Program Sidoarjo Bersih Dan Hijau Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Deskriptif Kemitraan antara Radar Surabaya dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo). *Kebijakan danManajemen Publik*, *5*(1), 90-105.

Astari, Anindita. (2014), "Keterkaitan Antara Regionalisme Ekonomi Dengan Globalisasi Ekonomi." Universitas Indonesia: Tugas Karya Akhir Prodi Ilmu Hubungan Internasional

Badan Ekonomi Kreatif. (2015). (a). "Tonggak Baru Ekonomi Kreatif." http://www.bekraf.go.id/profil

Badan Ekonomi Kreatif. (2015). (b). "Subsektor Bekraf." http://www.bekraf.go.id/subsektor

Basuki, Galang Fitriandaru. (2019). Analis Kerja Sama Bilateral dan Regional (Staf Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri) Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Jakarta: Bekraf, Gedung Kementerian BUMN. Wawancara,21 Mei.

Burchill, Scott. 2005. The National Interest in International Relations Theory. United Kingdom: Palgrave.

Ernawati Purwaningsih. 2010. Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata Candirejo. Jantra.Volume V, Nomor 9.

Ginting, A. M., Rivani, E., Saragih, J. P., & Wuryandani, D. (2018). *Strategi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Gazali, M. (2017). Regulasi dan Strategi dalam Penyediaan Infrastruktur Air Minum Dengan Skema Public Private Partnership (PPP) Di Kabupaten Indragiri Hilir. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, *3*(1).

Habibah, E. N., Sos, S., & Rumah, P. P. (2020). *COLLABORATIVE GOVERNANCE: Konsep & Praktik dalam Pengelolaan Bank Sampah*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.

Hardi, W. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik.

Hasibuan, R. H., Arif, M., & Atika, A. (2023). Analisis Peran Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Dan Pengembangan Usaha Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pengrajin Toto Jaya Bingkai Di Kecamatan Medan Area). *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, *3*(1), 540- 553.

Hasan, M. (2018). Pembinaan ekonomi kreatif dalam perspektif pendidikan ekonomi. *Jurnal ekonomi dan Pendidikan*, *1*(1), 81-86.

Haryanti, N. (2020). Implementasi Public Private Partnership sebagai Usaha Keberhasilan Pengembangan Pariwisata di Era Global. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, *7*(1), 30-49.

Ismowati, M. (2016). Kajian Urgensi Public Private Partnerships di Kota Bandung. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, *8*(2), 141-149.

Irawan, Andri. (2015). "Ekonomi Kreatif Sebagai Suatu Solusi Mensejahterakan Masyarakat Dalam Meningkatkan Tingkat Perekonomian." Jurnal Elektronik.

Irwan Sudayat. 2015. Sukses Membangun Ekonomi Kreatif. Yogyakarta: Smart Pustaka.

Lolorenta N, Ester Luciana. (2015). "Strategi Customer Service dalam Mempromosikan Paket Always On pada Pengunjung Gerai 3 (Tri) Store Bandarlampung." Universitas Lampung: Skripsi.

Mauled Moelyono. 2010. Menggerakkan Ekonomi Kreatif. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.

Noviriska, N. (2022). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Publika*, *10*(2), 298-306.

Nasir dan Yuslinaini. 2017. Analisis Pemetaan Industri Kreatif Subsektor Kerajinan Serta Dampak Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT). Volume 1, Nomor1.

Ning Malihah dan Siti Achiria. 2019. Peran Ekonomi Kreatif Dalam

Pemberdayaan Industri Kerajinan Bambu. Jurnal Kajian Ekonomi Islam.Volume 4, Nomor 1.

Pahlevi, Andreas Syah. (2017). "Gagasan Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (Studi Pada Potensi, Peluang Dan Tantangan Ekonomi Kreatif Di Kota Malang)." Jurnal Elektronik

Purnomo, Rochmat Aldy. (2016). Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia.
Surakarta: Ziyad Visi Media.

Rusyadi, Y., Jumiati, I. E., & Yulianti, R. (2022). Sinergitas Pemangku Kepentingan Dalam Kerangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, *6*(2), 45-55.

Sugiyono, P. D. (2012). *Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif Da R&D* (23rd Ed.). Alfabeta.

Sri Wahyuningsih dan Dede Satriani.2019. Pendekatan Ekonomi Kreati Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita. Volume 8, Nomor2:195-205.

Suryana, 2017. Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang. Jakarta: Salemba Empat.

Bovaird, T. (2004). Public Private Partnership from Contested Concept to Prevalent Practice. *International Review of Administrative Science*, 199-215.

Dwiyanto. (2012). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. *Gadjah Mada University Press.* Yogyakarta .

Handayani, I. W. (2018). Peran Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Pariwisata*, 157-167.

Hapsari, R. A. (2019). Peran Sektor Swasta dalam Partnership Governance Pariwisata di Kabupaten Semarang. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 11-18.

Sholihin, Arianto, Khasanah (2018). Trend perkembangan ekonomi kreatif

Yahya, Muhammad. (2018). "Era Industri 4.0: Tantangan dan Peluang Perkembangan Pendidikan Kejuruan Indonesia." Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Professor Tetap dalam Bidang Ilmu Pendidikan Kejuruan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, Disampaikan pada Sidang Terbuka Luar Biasa Senat Universitas Negeri Makassar Tanggal 14 Maret 2018

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin N0.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Andi Ariel Setiadi
Nim : 105641107520
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	19 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 04 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Pernerbitan,

Muhsinah Nahrim, M.I.P
NBM 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Andi Ariel Setiadi 105641107520

ORIGINALITY REPORT

9%	5%	4%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

LULUS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%
2	text-id.123dok.com Internet Source	2%
3	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	2%
4	Submitted to Universitas Mercu Buana Student Paper	2%
5	digilib.unila.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		

BAB II Andi Ariel Setiadi 105641107520

ORIGINALITY REPORT

19%	19%	5%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	8%
2	journal.unpas.ac.id Internet Source	7%
3	repository.lainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unair.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LULUS
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
turnitin

BAB III Andi Ariel Setiadi 105641107520

ORIGINALITY REPORT

8%	6%	7%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unriksha.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	2%
3	Maturidi Maturidi. "IMPLEMENTASI METODE LANGSUNG DALAM MENINGKATKAN BAHASA ARAB", As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2020 Publication	2%
4	ejournal.kemenperin.go.id Internet Source	2%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		

LULUS

turnitin

BAB IV Andi Ariel Setiadi 105641107520

ORIGINALITY REPORT

6%	6%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.wikipedia.org Internet Source	3%
2	repository.unibos.ac.id Internet Source	3%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LULUS
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V Andi Ariel Setiadi 105641107520

ORIGINALITY REPORT

4%	3%	1%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	2%
2	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
3	Asranita Asranita, Siti Malikhatun Badriyah. "Reduction of BPHTB Rates: Legal Protection Strategy for the Economically Disadvantaged Community", SIGn Jurnal Hukum, 2023 Publication	1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches Off

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LULUS
turnitin
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Andi Ariel Setiadi, Lahir di Bulukumba 07 Oktober 2002, Anak kedua dari tiga bersaudara, buah kasih dari pasangan Abd Azis dan Nurcaya Rajin. Penulis pertama kali menempuh pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2008 di SDN 248 Laikang dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di sekolah Menengah Pertama di SMPN Satap 4 Bulukumba dan selesai pada tahun 2017, dan penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 5 Bulukumba pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis mendapat kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan dapat menyusun skripsi ini dengan judul "**Partnership Governance Dalam Pengembangan Ekonmi Kreatif di Kabupaten Bulukumba**".